



Pemerintah Kabupaten
Kutai Timur

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ-IP) TAHUN 2024

TAHUN ANGGARAN 2025

**DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN**



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur dalam pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan bidang Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Kutai Timur tahun 2024, guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026.

Didalam LKj-IP ini disajikan target dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 yang meliputi 3 (tiga) sasaran strategis bidang pendidikan, yaitu (1) Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat, dengan indikator Angka Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah, dan meningkatnya persentase guru yang memenuhi kualifikasi D4/S1 (2) Sasaran Strategis meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan, dengan indikator Rasio Ketersediaan SD/MI perpenduduk dan Rasio Ketersediaan SMP/MTs perpenduduk (3) Sasaran Strategis terwujudnya SDM yang beriman, berakhlak mulia, dan berbudaya dengan indikator meningkatnya persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal jenjang SD dan meningkatnya persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal jenjang SMP (4) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dengan indikator cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan laporan keuangan dinas Pendidikan. Selain itu, dilaporkan pula capaian akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas kinerja keuangan APBD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur TA 2024.

Di pihak lain, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur menyadari bahwa tantangan pembangunan pendidikan masih cukup banyak, dan memerlukan kerja yang lebih keras pada tahun-tahun mendatang, Dengan dukungan dari semua pihak diharapkan tantangan dan masalah yang masih harus ditangani sebagaimana ditargetkan, pada saatnya akan dapat terselesaikan dengan baik.

Melalui LKj-IP ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur berharap dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja pembangunan bidang pendidikan pada tahun 2024. Selain itu, LKj-IP ini diharapkan juga dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur pada tahun-tahun mendatang.



Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan laporan ini, baik dalam bentuk kontribusi data, kontribusi penulisan laporan, maupun bentuk kontribusi lainnya, kami ucapkan terima kasih.

Sangatta, Januari 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,



Mulyono, S.STP.,M.Si.

NIP. 19770202 199703 1 004



RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai RPJMD Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024, Renstra Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur 2019-2024, serta Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur 2021-2026 diarahkan untuk mewujudkan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu. Hal ini ditujukan agar peserta memiliki akhlak mulia, bersikap kreatif, dan inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin dan bertanggung jawab, berketerampilan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sejalan dengan misi pendidikan nasional tersebut dan merespon perkembangan global abad 21 maka arah tujuan dan sasaran pendidikan di Kabupaten Kutai Timur dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Pertama, Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat.
- Kedua, Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang beriman, berakhlak mulia, dan berbudaya.
- Ketiga, Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan
- Keempat, Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Dari keempat arah di atas pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan pada angka Harapan Lama Sekolah (HLS) yang meningkat dari tahun 2023 sebesar 13,01 menjadi 13,02 di tahun 2024. Nilai ini dapat diartikan bahwa lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak usia minimal 7 tahun di Kabupaten Kutai Timur berpeluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA atau D1. Untuk angka Rata-rata lama Sekolah juga meningkat dari tahun 2023 sebesar 9,45 menjadi 9,47 pada tahun 2024. Nilai ini dapat diartikan bahwa secara rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Kutai Timur telah mencapai 9,47 tahun pendidikan atau setara dengan jenjang SMP kelas IX atau kelas X Semester 1.

Capaian kinerja sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur tahun 2024 secara umum dalam kategori **sangat memuaskan**. Diharapkan capaian-capaian indikator kinerja selalu meningkat setiap tahunnya, dan diperoleh pula hasil yang baik untuk bidang pendidikan khususnya.

Meskipun telah banyak kinerja dihasilkan selama tahun 2024, namun masih banyak permasalahan dalam bidang pendidikan yang perlu segera diselesaikan, seperti masih banyaknya sekolah jenjang SD yang perlu di rehab sedang/berat, masih banyaknya perlu



penambahan ruang kelas baru, dan peningkatan sarana prasarana Pendidikan seperti mebel dan utilitas sekolah, serta masih banyaknya sekolah yang sudah meluluskan peserta didik tetapi belum mempunyai Gedung sekolah. Pada masa Pandemi seperti ini juga sangat perlu dilakukan peningkatan kualitas guru dalam meningkatkan inovasi pembelajaran abad 21 agar dapat menyesuaikan dengan keadaan sekarang ini dan dapat meningkatkan kualitas Pendidikan baik jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, dan C. Serta masih kurangnya kegiatan-kegiatan kebudayaan kearifan lokal yang dapat meningkatkan daya tarik Masyarakat luar untuk berkunjung ke Kabupaten Kutai Timur untuk menikmati seni, budaya dan adat yang ada di Kabupaten Kutai Timur.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

RINGKASAN EKSEKUTIF iii

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL vii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Landasan Hukum 2

 1.3 Tujuan Penulisan Laporan 3

 1.4 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi..... 3

 1.5 Aspek Strategis Organisasi..... 5

 1.6 Struktur Organisasi 5

 1.7 Uraian Tugas dan Fungsi..... 7

 1.8 Sumber Daya Manusia 18

 1.9 Sistematika Laporan 19

BAB II PERANCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 21

 2.1 Rencana Strategis 21

 2.1.1 Visi dan Misi 21

 2.1.2 Telaahan Rencana Strategis K/L dan Renstra 27

 2.1.2.1 Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan Nasional 27

 2.1.2.2 Telaahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur 28

 2.1.3 Tujuan dan Sasaran..... 29

 2.1.4 Indikator Kinerja 32

 2.1.5 Strategi dan Kebijakan..... 34

 2.1.6 Program dan Kegiatan..... 37

 2.1.7 Rencana Kinerja Tahunan 43

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 48

 3.1 Capaian Kinerja Organisasi..... 48

 3.1.1 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) 51

 3.1.2 Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)..... 52

 3.1.3 Guru yang Memenuhi Kualifikasi D-IV / S1 53

 3.1.4 Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SD dan SMP 54

 3.1.5 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD dan SMP .. 54



3.1.6 Angka Kelulusan (AL)..... 55

3.1.7 Angka Partisipasi Murni (APM) 55

3.1.8 Angka Partisipasi Kasar (APK)..... 55

3.1.9 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 56

3.1.10 Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik 57

3.1.11 Rasio Siswa Per Guru (R-S/G)..... 57

3.1.12 Angka Putus Sekolah (AptS)..... 57

3.1.13 Angka Melanjutkan (AM) 58

3.2 Analisis Capaian Kinerja..... 58

 A. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Taraf Pendiidkan Masyarakat..... 60

 1) Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini 60

 2) Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu 66

 3) Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi 71

 4) Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional..... 77

 5) Analisis Capaian Kinerja 78

 6) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 81

 7) Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Pernyataan Kinerja..... 82

3.3 Realisasi Anggaran 105

BAB IV PENUTUP103

4.1 Kesimpulan103

4.2 Langkah Perbaikan103

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pegawai dan Pengawas Sekolah Madya berdasarkan Gol6

Tabel 1.2 Data Pegawai dan Pengawas Sekolah Madya berdasarkan Tingkat Eselon7

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Status Kepegawaian7

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran 15

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama 17

Tabel 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan 18

Tabel 2.4 Program dan Kegiatan 20

Tabel 2.5 Rencana Kinerja Tahunan 27

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kab.Kutai Timur Tahun 2016-2021 29

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Organisasi 30

Tabel 3.2 Sekolah Pendidikan Kondisi Bangunan Baik 31

Tabel 3.3 Rasio Ketersediaan Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah 32

Tabel 3.4 Rasio Guru dan Murid Pendidikan Dasar dan Menengah 33

Tabel 3.5 Jumlah Guru di Kabupaten Kutai Timur 33

Tabel 3.6 Angka Partisipasi Murni (BPS)..... 36

Tabel 3.7 Angka Partisipasi Kasar (BPS) 36

Tabel 3.8 Angka Partisipasi Murni (Capil)..... 36

Tabel 3.9 Angka Partisipasi Kasar (Capil) 37

Tabel 3.10 Angka Putus Sekolah..... 37

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Pelayanan Pendidikan

Tabel 1 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini Sasaran 39

Tabel 2 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Berakhir 39

Tabel 3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi..... 39

Tabel 4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 40

Sasaran Strategis 2 : Tercapainya Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan

Tabel 1 Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini 41

Tabel 2 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi 41

Tabel 3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 42

Sasaran Strategis 3 : Tercapainya Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan

Tabel 1 Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini 42

Tabel 2 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir 43

Tabel 3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi 44

Tabel 4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional..... 44



Tabel 5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya45

Sasaran Strategis 4 : Tercapainya Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan

Tabel 1 Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini46

Tabel 2 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir46

Tabel 3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi47

Tabel 4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional.....47

Tabel 5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya48

Sasaran Strategis 5 : Tercapainya Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan

Tabel 1 Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini49

Tabel 2 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir49

Tabel 3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi50

Tabel 4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional.....50

Tabel 5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya51

Sasaran Strategis 6 : Tercapainya Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan

Tabel 1 Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini51

Tabel 2 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir52

Tabel 3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi53

Tabel 4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional.....54

Tabel 5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya55

Sasaran Strategis 7 : Tercapainya Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan

Tabel 1 Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini56

Tabel 2 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir57

Tabel 3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi57

Tabel 4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional.....57

Tabel 5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya58

Tabel 3.11 Realisasi Anggaran.....59



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur disusun dalam rangka pelaksanaan amanah Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur memiliki dua fungsi, pertama merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati hasil pelaksanaan program kegiatan yang mendapatkan dukungan pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Fungsi kedua merupakan sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Adanya dua fungsi utama memperjelas bahwa informasi yang tertuang dalam laporan Kinerja Tahun 2024 harus dapat memenuhi kebutuhan pengguna internal dan eksternal.

Secara keseluruhan informasi dalam Laporan Kinerja tersebut berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dicapai pada tahun 2024. Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja merupakan kinerja yang akan dicapai selama tahun 2024 mengacu pada Rencana Strategis 2021-2026 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur, capaian kinerja merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan selama tahun 2024 yang memang diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja 2024.



Selain mendapatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2024, juga mendapatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Dana Dekonsentrasi TA 2024, oleh sebab itu dalam laporan pelaksanaan hasil program dan kegiatan dilaporkan realisasi pelaksanaannya dari kedua sumber anggaran tersebut.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang melandasi disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) hasil Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur tahun 2024, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 200 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah;
4. Peraturan Pemerintah 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 181 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonstrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;



12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur;
14. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024;
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024

1.3 TUJUAN PENULISAN LAPORAN

Tujuan Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 mempunyai tujuan melaporkan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran 2024 yang dikaitkan dengan proses pencapaian Indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai sarana bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur (Bupati) atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan. Selain itu sebagai bahan evaluasi, secara makro diantaranya pengembangan pendidikan. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

1.4 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pendayagunaan Aparatur Negara terus ditingkatkan, dimaksudkan agar kualitas, efisiensi pelayanan dan pengayom kepada masyarakat dapat pula meningkat sejalan dengan dinamika laju pembangunan dan salah satu langkah yang ditempuh oleh Pemerintah adalah meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat khususnya peserta didik yang terencana dan diselenggarakan secara terus menerus, terpadu, sesuai dengan tuntutan tugas yang semakin meningkat. Sejalan dengan maksud tersebut, dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur, maka dipandang perlu mengatur Peraturan Bupati Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.



1. KEDUDUKAN

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Dasar pembentukan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur.

2. TUGAS POKOK

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

3. FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 9 Tahun 2023, untuk penyelenggaraan tugas pokoknya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penetapan kebijakan teknis bidang Pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Perencanaan, pembinaan pengendalian kebijakan teknis di bidang Pendidikan dan kebudayaan;
- c. Perencanaan, pembinaan dan pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan teknis bidang Pendidikan dasar;
- d. Perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan teknis bidang Pendidikan menengah;
- e. Perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan teknis bidang Pendidikan luar sekolah;
- f. Perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan teknis bidang kebudayaan;
- g. Perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan teknis bidang pengembangan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
- h. Pembinaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas;
- i. Pembinaan unit pelaksana Teknis Dinas; dan
- j. Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional.



1.5 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Pergeseran dan perubahan struktural di bidang ekonomi dan tenaga kerja, percepatan perkembangan ilmu dan teknologi dan perubahan jenis keterampilan kerja yang diperlukan, akan menimbulkan sejumlah kecenderungan dan tantangan baru yang pada gilirannya berakibat kepada perubahan sistem pendidikan di masa depan. Diantara perubahan penting itu adalah :

1. Makin pentingnya orientasi nilai tambah (*value-added orientation*) terkait dengan makin mendesaknya kebutuhan untuk menaikkan tingkat produktivitas nasional dan pertumbuhan ekonomi sebagai wahana untuk mempertahankan dan memperbaiki seluruh tatanan pembangunan sosial.
2. Perubahan dalam struktur sosial sebagai proses penemuan bentuk transformasi dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Transformasi ini timbul sebagai konsekuensi dari makin lajunya peran dan posisi sektor industri yang memerlukan berbagai keterampilan dan keahlian inovatif yang kondusif dengan perkembangan iptek.
3. Dampak dari proses globalisasi. Globalisasi yang semakin meluas dan masih tak dapat dihindari akan berpengaruh kepada kondisi sosial politik bahkan budaya bangsa Indonesia.

1.6 STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur adalah Instansi Eselon II. (Struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur terlampir).



```

graph TD
    KD[Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan] --> KJF[Kelompok Jabatan Fungsional]
    KD --> Sek[Sekretaris]
    KD --> KSU[Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian]
    KD --> JPA[Jf Perencana Ahli Muda]
    KD --> KBPA[Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal]
    KD --> KBPS[Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar]
    KD --> KBPM[Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama]
    KD --> KBPK[Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan]
    KD --> KBK[Kepala Bidang Kebudayaan]
    KBPA --> KSKPP[Kepala Seksi Kurikulum Peserta Didik, Pembangunan Karakter dan Penilaian]
    KBPS --> KSKPPS[Kepala Seksi Kurikulum Peserta Didik, Pembangunan Karakter dan Penilaian]
    KBPM --> KSKPPM[Kepala Seksi Kurikulum Peserta Didik, Pembangunan Karakter dan Penilaian]
    KBPK --> KSKPPK[Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal]
    KBK --> KSKC[Kepala Seksi Cagar Budaya, Sejarah, Tradisi, Kesenian dan Permuseuman]
    KSKPP --> KSKPP_K1[Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana]
    KSKPP --> JfPK1[Jf Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda]
    KSKPPS --> KSKPPS_K1[Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana]
    KSKPPS --> JfPK1S[Jf Pengembang Kurikulum Ahli Muda]
    KSKPPM --> KSKPPM_K1[Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana]
    KSKPPM --> JfPK1M[Jf Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda]
    KSKPPK --> KSKPPK_K1[Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar]
    KSKPPK --> JfPK1K[Jf Pengembang Penilaian Pendidikan Ahli Muda]
    KSKC --> KSKC_K1[Kepala Seksi Tenaga Kebudayaan]
    KSKC --> JfPK1C[Jf Pamong Budaya Ahli Muda]
    KSKPP_K1 --> KSKPP_K1_K1[Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana]
    KSKPP_K1_K1 --> JfPK1_K1_K1[Jf Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda]
    KSKPPS_K1 --> KSKPPS_K1_K1[Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana]
    KSKPPS_K1_K1 --> JfPK1S_K1_K1[Jf Pengembang Kurikulum Ahli Muda]
    KSKPPM_K1 --> KSKPPM_K1_K1[Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana]
    KSKPPM_K1_K1 --> JfPK1M_K1_K1[Jf Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda]
    KSKPPK_K1 --> KSKPPK_K1_K1[Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar]
    KSKPPK_K1_K1 --> JfPK1K_K1_K1[Jf Pengembang Penilaian Pendidikan Ahli Muda]
    KSKC_K1 --> KSKC_K1_K1[Kepala Seksi Tenaga Kebudayaan]
    KSKC_K1_K1 --> JfPK1C_K1_K1[Jf Pamong Budaya Ahli Muda]
    KSKPP_K1_K1 --> KSKPP_K1_K1_K1[Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana]
    KSKPP_K1_K1_K1 --> JfPK1_K1_K1_K1[Jf Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda]
    KSKPPS_K1_K1 --> KSKPPS_K1_K1_K1[Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana]
    KSKPPS_K1_K1_K1 --> JfPK1S_K1_K1_K1[Jf Pengembang Kurikulum Ahli Muda]
    KSKPPM_K1_K1 --> KSKPPM_K1_K1_K1[Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana]
    KSKPPM_K1_K1_K1 --> JfPK1M_K1_K1_K1[Jf Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda]
    KSKPPK_K1_K1 --> KSKPPK_K1_K1_K1[Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar]
    KSKPPK_K1_K1_K1 --> JfPK1K_K1_K1_K1[Jf Pengembang Penilaian Pendidikan Ahli Muda]
    KSKC_K1_K1 --> KSKC_K1_K1_K1[Kepala Seksi Tenaga Kebudayaan]
    KSKC_K1_K1_K1 --> JfPK1C_K1_K1_K1[Jf Pamong Budaya Ahli Muda]
    KSKPP_K1_K1_K1 --> KSKPP_K1_K1_K1_K1[Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana]
    KSKPP_K1_K1_K1_K1 --> JfPK1_K1_K1_K1_K1[Jf Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda]
    KSKPPS_K1_K1_K1 --> KSKPPS_K1_K1_K1_K1[Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana]
    KSKPPS_K1_K1_K1_K1 --> JfPK1S_K1_K1_K1_K1[Jf Pengembang Kurikulum Ahli Muda]
    KSKPPM_K1_K1_K1 --> KSKPPM_K1_K1_K1_K1[Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana]
    KSKPPM_K1_K1_K1_K1 --> JfPK1M_K1_K1_K1_K1[Jf Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda]
    KSKPPK_K1_K1_K1 --> KSKPPK_K1_K1_K1_K1[Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar]
    KSKPPK_K1_K1_K1_K1 --> JfPK1K_K1_K1_K1_K1[Jf Pengembang Penilaian Pendidikan Ahli Muda]
    KSKC_K1_K1_K1 --> KSKC_K1_K1_K1_K1[Kepala Seksi Tenaga Kebudayaan]
    KSKC_K1_K1_K1_K1 --> JfPK1C_K1_K1_K1_K1[Jf Pamong Budaya Ahli Muda]
    KSKPP_K1_K1_K1_K1 --> KSKPP_K1_K1_K1_K1_K1[Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana]
    KSKPP_K1_K1_K1_K1_K1 --> JfPK1_K1_K1_K1_K1_K1[Jf Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda]
    KSKPPS_K1_K1_K1_K1 --> KSKPPS_K1_K1_K1_K1_K1[Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana]
    KSKPPS_K1_K1_K1_K1_K1 --> JfPK1S_K1_K1_K1_K1_K1[Jf Pengembang Kurikulum Ahli Muda]
    KSKPPM_K1_K1_K1_K1 --> KSKPPM_K1_K1_K1_K1_K1[Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana]
    KSKPPM_K1_K1_K1_K1_K1 --> JfPK1M_K1_K1_K1_K1_K1[Jf Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda]
    KSKPPK_K1_K1_K1_K1 --> KSKPPK_K1_K1_K1_K1_K1[Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar]
    KSKPPK_K1_K1_K1_K1_K1 --> JfPK1K_K1_K1_K1_K1_K1[Jf Pengembang Penilaian Pendidikan Ahli Muda]
    KSKC_K1_K1_K1_K1 --> KSKC_K1_K1_K1_K1_K1[Kepala Seksi Tenaga Kebudayaan]
    KSKC_K1_K1_K1_K1_K1 --> JfPK1C_K1_K1_K1_K1_K1[Jf Pamong Budaya Ahli Muda]
    KSKPP_K1_K1_K1_K1_K1 --> KSKPP_K1_K1_K1_K1_K1_K1[Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana]
    KSKPP_K1_K1_K1_K1_K1_K1 --> JfPK1_K1_K1_K1_K1_K1_K1[Jf Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda]
    KSKPPS_K1_K1_K1_K1_K1 --> KSKPPS_K1_K1_K1_K1_K1_K1[Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana]
    KSKPPS_K1_K1_K1_K1_K1_K1 --> JfPK1S_K1_K1_K1_K1_K1_K1[Jf Pengembang Kurikulum Ahli Muda]
    KSKPPM_K1_K1_K1_K1_K1 --> KSKPPM_K1_K1_K1_K1_K1_K1[Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana]
    KSKPPM_K1_K1_K1_K1_K1_K1 --> JfPK1M_K1_K1_K1_K1_K1_K1[Jf Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda]
    KSKPPK_K1_K1_K1_K1_K1 --> KSKPPK_K1_K1_K1_K1_K1_K1[Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar]
    KSKPPK_K1_K1_K1_K1_K1_K1 --> JfPK1K_K1_K1_K1_K1_K1_K1[Jf Pengembang Penilaian Pendidikan Ahli Muda]
    KSKC_K1_K1_K1_K1_K1 --> KSKC_K1_K1_K1_K1_K1_K1[Kepala Seksi Tenaga Kebudayaan]
    KSKC_K1_K1_K1_K1_K1_K1 --> JfPK1C_K1_K1_K1_K1_K1_K1[Jf Pamong Budaya Ahli Muda]
    KSKPP_K1_K1_K1_K1_K1_K1 --> KSKPP_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1[Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana]
    KSKPP_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1 --> JfPK1_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1[Jf Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda]
    KSKPPS_K1_K1_K1_K1_K1_K1 --> KSKPPS_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1[Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana]
    KSKPPS_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1 --> JfPK1S_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1[Jf Pengembang Kurikulum Ahli Muda]
    KSKPPM_K1_K1_K1_K1_K1_K1 --> KSKPPM_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1[Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana]
    KSKPPM_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1 --> JfPK1M_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1[Jf Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda]
    KSKPPK_K1_K1_K1_K1_K1_K1 --> KSKPPK_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1[Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar]
    KSKPPK_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1 --> JfPK1K_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1[Jf Pengembang Penilaian Pendidikan Ahli Muda]
    KSKC_K1_K1_K1_K1_K1_K1 --> KSKC_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1[Kepala Seksi Tenaga Kebudayaan]
    KSKC_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1 --> JfPK1C_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1[Jf Pamong Budaya Ahli Muda]
    KSKPP_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1 --> KSKPP_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1[Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana]
    KSKPP_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1 --> JfPK1_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1[Jf Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda]
    KSKPPS_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1 --> KSKPPS_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1[Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana]
    KSKPPS_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1 --> JfPK1S_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1[Jf Pengembang Kurikulum Ahli Muda]
    KSKPPM_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1 --> KSKPPM_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1[Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana]
    KSKPPM_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1 --> JfPK1M_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1[Jf Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda]
    KSKPPK_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1 --> KSKPPK_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1[Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar]
    KSKPPK_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1 --> JfPK1K_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1[Jf Pengembang Penilaian Pendidikan Ahli Muda]
    KSKC_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1 --> KSKC_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1[Kepala Seksi Tenaga Kebudayaan]
    KSKC_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1 --> JfPK1C_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1[Jf Pamong Budaya Ahli Muda]
    KSKPP_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1 --> KSKPP_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1[Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana]
    KSKPP_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1 --> JfPK1_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1[Jf Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda]
    KSKPPS_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1 --> KSKPPS_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1[Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana]
    KSKPPS_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1 --> JfPK1S_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1[Jf Pengembang Kurikulum Ahli Muda]
    KSKPPM_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1 --> KSKPPM_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1_K1[Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana]
    KSKPPM_K1_K
```



Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur berpedoman pada Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 9 Tahun 2023. Dalam Bab XX keputusan tersebut di atas menyebutkan bahwa Susunan Organisasi perangkat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur terdiri dari:

1. **Kepala Dinas**
2. **Sekretariat** terdiri dari:
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. **Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal** terdiri dari:
 - a. Seksi Kurikulum, Peserta Didik, Pembangunan Karakter dan Penilaian;
 - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
4. **Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar** terdiri dari:
 - a. Seksi Kurikulum, Peserta Didik, Pembangunan Karakter dan Penilaian;
 - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
5. **Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah** terdiri dari:
 - a. Seksi Kurikulum, Peserta Didik, Pembangunan Karakter dan Penilaian;
 - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
6. **Bidang Pembinaan Ketenagaan** terdiri dari:
 - a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
 - b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar.
7. **Bidang Kebudayaan** terdiri dari:
 - a. Seksi Cagar Budaya, Sejarah, Tradisi, Kesenian dan Permuseuman;
 - b. Seksi Tenaga Kebudayaan.
8. **Kelompok Jabatan Fungsional**
9. **Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).**

1.7 URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

1. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tat usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai tugas mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program , kegiatan dan anggaran dibidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan dasar, Pendidikan nonformal dan kebudayaan serta tugas pembantuan di bisang Pendidikan dan kebudayaan;



- b. Pengelolaan data dan informasi di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan dasar, Pendidikan nonformal dan kebudayaan;
- c. Koordinasi dan pelaksanaan Kerjasama di bidang Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, Pendidikan nonformal dan kebudayaan;
- d. Koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan Disdikbud;
- e. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum di bidang Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, Pendidikan nonformal dan kebudayaan;
- f. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Disdikbud;
- g. Pengelolaan kepegawaian di lingkungan Disdikbud
- h. Penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang Pendidikan dan kebudayaan yang meliputi usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta pendataan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus, fasilitasi pelaksanaan akreditasi Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, dan Pendidikan nonformal, fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan Pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama serta Pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan karier pendidik, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian sekolah dasar kerja sama, dan sekolah menengah pertama kerja sama, fasilitasi urusan pembinaan perfilman, fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia, dan tugas-tugas pembantuan lainnya;
- i. Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan Masyarakat di bidang Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, Pendidikan nonformal dan kebudayaan;
- j. Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, Pendidikan nonformal dan kebudayaan;
- k. Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Disdikbud; dan
- l. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Disdikbud.



2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan yang meliputi :

- a. Persuratan;
- b. Tata Usaha;
- c. Kearsipan;
- d. Administrasi ASN;
- e. Perlengkapan;
- f. Rumah tangga; dan
- g. Penataan barang milik negara.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan kegiatan surat menyurat dan tata kearsipan, urusan rumah tangga dan administrasi perjalanan dinas;
- b. Pengadaan perlengkapan, penatausahaan, pemeliharaan dan inventarisasi aset;
- c. Penyusunan kebutuhan perlengkapan kerja sesuai dengan standarisasi yang berlaku;
- d. Pengajuan usulan untuk penghapusan barang-barang milik negara/ daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengkoordinasian urusan keprotokolan; dan
- f. Penataanusahaan Kepegawaian.

3. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Disdikbud.

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembanguna karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- b. Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurirkulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan Pembangunan



karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;

- c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan Nonformal;
- d. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, pentaan dan penutupan satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- e. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan Pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Nonformal;
- f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan Pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- g. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan Pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

4. Seksi Kurikulum, Peserta Didik, Pembangunan Karakter dan Penilaian Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

Seksi Kurikulum, Peserta Didik, Pembangunan Karakter dan Penilaian mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian, pembinaan minat, bakat, prestasi dan Pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- b. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian Pendidikan Nonformal;
- c. Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini, pembinaan minat, bakat, prestasi, dan Pembangunan karakter peserta didik dan Pendidikan Nonformal;
- e. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian Pendidikan, pembinaan minat, bakat, prestasi, dan Pembangunan karakter peserta didik anak usia dini dan Pendidikan Nonformal; dan
- f. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan Pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.



5. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- b. Penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- c. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
- e. Pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

6. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah dasar Disdikbud.

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan Pembangunan karakter sekolah dasar;
- b. Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan Pembangunan karakter sekolah dasar;
- c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar;
- d. Penyusunan bahan penertiban izin pendirian, penataan dan penutupan sekolah dasar;
- e. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan Pembangunan karakter sekolah dasar;
- f. Penyusunan bahan pembinaan Bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan Pembangunan karakter sekolah dasar; dan



- h. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan Pembangunan karakter sekolah dasar.

7. Seksi Kurikulum, Peserta Didik, Pembangunan Karakter dan Penilaian Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

Seksi Kurikulum, Peserta Didik, Pembangunan Karakter dan Penilaian mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian, pembinaan minat, bakat, prestasi dan Pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar;
- b. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian Sekolah Dasar;
- c. Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar;
- d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini, pembinaan minat, bakat, prestasi, dan Pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar;
- e. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian Pendidikan, pembinaan minat, bakat, prestasi, dan Pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar; dan
- f. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan Pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar.

8. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar;
- b. Penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar;
- c. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan sekolah dasar;
- d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar; dan
- e. Pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar.



9. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sekolah menengah pertama pada Disdikbud.

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan Pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- b. Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan Pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama;
- d. Penyusunan bahan penertiban izin pendirian, pentaan dan penutupan sekolah menengah pertama;
- e. Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan Pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan Pembangunan karakter sekolah menengah pertama; dan
- g. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan Pembangunan karakter sekolah menengah pertama.

10. Seksi Kurikulum, Peserta Didik, Pembangunan Karakter dan Penilaian Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Seksi Kurikulum, Peserta Didik, Pembangunan Karakter dan Penilaian mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian, pembinaan minat, bakat, prestasi dan Pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah pertama;
- b. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian sekolah menengah pertama;
- c. Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama;
- d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan



- penilaian Pendidikan Anak Usia Dini, pembinaan minat, bakat, prestasi, dan Pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah pertama;
- e. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian Pendidikan, pembinaan minat, bakat, prestasi, dan Pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah pertama; dan
 - f. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan Pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah pertama.'

11. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama;
- b. Penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama;
- c. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan sekolah menengah pertama;
- d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama; dan
- e. Pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama.

12. Bidang Pembinaan Ketenagaan

Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal, serta tenaga Kebudayaan pada Disdikbud.

Bidang Pembinaan Ketenagaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal, serta tenaga Kebudayaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Nonformal, serta tenaga Kebudayaan;



- c. Penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Nonformal, serta tenaga Kebudayaan;
- d. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal;
- e. Penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten;
- f. Penyusunan bahan pembinaan di bidang tenaga Cagar Budaya dan permuseuman, tenaga kesejahteraan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga Kebudayaan lainnya;
- g. Penyusunan bahan permantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan Pendidikan Nonformal, serta tenaga Kebudayaan; dan
- h. Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Nonformal, serta tenaga Kebudayaan.

13. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas:

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- b. Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Anak Nonformal;
- c. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
- e. Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

14. Bidang Pengembangan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar mempunyai tugas:

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan



- pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- b. Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - c. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
 - e. Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

15. Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kebudayaan Disdikbud.

Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan Sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan Lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- b. Penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan Sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan Lembaga adat dan pembinaan kesenian;
- c. Penyusunan bahan pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
- d. Penyusunan bahan pelestarian tradisi yang Masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
- e. Penyusunan bahan pembinaan komunitas dan Lembaga adat yang Masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
- f. Penyusunan bahan pembinaan kesenian yang Masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
- g. Penyusunan bahan pembinaan Sejarah lokal kabupaten;
- h. Penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten;
- i. Penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar kabupaten;
- j. Penyusunan bahan pengelolaan museum kabupaten;



- k. Penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan Sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- l. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan Sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas, dan Lembaga adat dan pembinaan kesenian; dan
- m. Pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan Sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan Lembaga adat dan pembinaan kesenian.

16. Seksi Cagar Budaya, Permuseuman, Sejarah, Tradisi dan Kesenian

Seksi Cagar Budaya, Permuseuman, Sejarah, Tradisi dan Kesenian mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat serta permuseuman;
- b. Penyusunan bahan pembinaan dan fasilitasi registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya;
- c. Penyusunan bahan pelestarian tradisi dan kesenian;
- d. Penyusunan bahan pelaksanaan perlindungan, pengembangan, Sejarah, tradisi dan pemanfaatan museum;
- e. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang Sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan Lembaga adat;
- f. Penyusunan bahan penertiban izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten;
- g. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman; dan
- h. Pelaporan di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman.

17. Seksi Tenaga Kebudayaan

Seksi Tenaga Kebudayaan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga



- kebudayaan lainnya;
- b. Penyusunan bahan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
- c. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
- d. Pelaporan di bidang pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian dan tenaga kebudayaan lainnya.

1.8 SUMBER DAYA MANUSIA

Gambaran umum Sumber Daya Aparatur (personil) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur sampai dengan akhir Desember 2024 kondisi pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut :

TABEL 1.1

Data Pegawai dan Pengawas Sekolah Madya Dinas Pendidikan
Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.1									
Profil Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan									
No.	Golongan	Pendidikan							Total
		S-3	S-2	S-1	D-III	SLTA	SLTP	SD	
1.	Golongan IV	1	100	220	0	0	0	0	321
2.	Golongan III	0	134	1370	15	20	0	0	1539
3.	Golongan IX	0	0	1965	0	0	0	0	1965
4.	Golongan II	0	0	44	4	10	1	80	139
5.	Golongan I	0	0	0		0	0	4	4
Total		1	234	3599	19	30	1	84	3968
		0,01%	5,90%	90,70%	0,48%	0,76%	0,01%	2,12%	

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024



TABEL 1.2

Data Pegawai dan Pengawas Sekolah Madya Dinas Pendidikan
Berdasarkan Tingkat Eselon

No	URAIAN	JUMLAH	%
1	- Eselon II	1	0,02
2	- Eselon III	5	0,10
3	- Eselon IV	10	0,21
4	- PNS	1950	40,58
5	- PPPK	1965	40,90
6	- Pengawas Sekolah Madya	31	0,65
7	- TK2D Dinas	837	17,42
	JUMLAH	4805	100

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

TABEL 1.3

Jumlah Pegawai
Berdasarkan Tingkat Status Kepegawaian

No	STATUS PEGAWAI	JUMLAH	%
1	- ASN	3968	82,58
2	- NON ASN	837	17,42
	Jumlah	4805	100

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

1.8 SISTEMATIKA LAPORAN

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini yang pertama menyajikan Latar Belakang disusunnya Laporan Kinerja – Instansi Pemerintah (LKJ-IP) yang disusun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024 dan kedua menyajikan tentang Tujuan Penulisan Laporan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan pendidikan di Kabupaten Kutai Timur yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui dana Dekonsentrasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan tentang acuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur sebagaimana penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2022-2023, yang kemudian dari Renstra tersebut akan di turunkan dalam bentuk Renja sebagai dasar



Rencana Kerja Tahunan (RKT), yang selanjutnya tertuang lebih terinci sebagai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Capaian Kinerja dan Realisasi pelaksanaan dalam dokumen DPA tersebut dijabarkan dalam program dan kegiatan yang di syahkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 berdasarkan pada tujuan dan sasaran strategis dengan indikator Kinerja dan capaiainya.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan tentang Capaian Kinerja Organisasi sebagaimana dalam penjabarannya secara analisis capaian kinerja dinas sesuai dengan dokumen Renstra 2021-2026 yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dengan indikator kinerja dan capaiannya secara rinci dan jelas. Selanjutnya dianalisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusinya serta Analisis Penggunaan sumber daya anggaran. Realisasi anggaran diuraikan berdasarkan sumber pendanaan. Selanjutnya diselaraskan dengan realisasi anggaran PAD dan pendanaan APBD dan APBN yang diperoleh dan dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2024 berlangsung. Berikut prestasi yang dihasilkan selama tahun 2024.

Bab IV Penutup

Pada Bab ini berisikan penutup yang menguraikan tentang tiga hal yaitu kesimpulan, permasalahan dan kendala, serta langkah kedepan/rekomendasi yang dihasilkan setelah berlangsungnya dan pengembangan pendidikan, serta rekomendasi kebijakan yang diberikan dalam mendukung pelaksanaan ditahun-tahun berikutnya.

Lampiran-Lampiran

1. Lampiran I
Matrik Adendum Renstra 2021-2026;
2. Lampiran II
Penetapan Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2024;
3. Lampiran III
Pengukuran Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur
4. Lampiran IV
Penghargaan dan prestasi Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur tahun 2024.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut, dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.

Guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas programnya, serta agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, suatu instansi pemerintah harus selalu melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut perlu akuntabilitas instansi pemerintah disusun dalam suatu pola yang sistematis dalam wujud perencanaan strategis dengan tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Adapun komponen-komponen RENSTRA seperti tersebut dibawah ini :

2.1 RENCANA STRATEGI (RENSTRA)

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 dapat dijelaskan secara singkat di bab ini :

2.1.1 VISI DAN MISI

Setiap periode kepemimpinan kepala daerah harus merumuskan visi pembangunan daerah yang bersangkutan, demikian juga dengan Kabupaten Kutai Timur. Rumusan visi menggambarkan kondisi yang ingin dicapai pada masa akhir jabatan Kepala Daerah. Adapun visi pembangunan Kabupaten Kutai Timur periode 2021-2026 adalah:

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih:

Visi Kabupaten Kutai Timur 2021-2026

“Menata Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua”



Gambar 2.1

Penjabaran Visi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk mewujudkan visinya terdapat Misi yaitu :



Gambar 2.2

Misi Kabupaten Kutai Timur 2021-2026



Dalam upaya untuk menyamakan persepsi agar misi tersebut dapat dicapai, maka perlu penjelasan dari masing-masing misi di atas, yang diuraikan sebagai berikut:

Misi 1 : Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu

Pembangunan yang diarahkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat yang sejahtera dengan mempertimbangkan budaya lokal serta lebih meningkatkan Ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan iman, takwa dan berakhlak mulia merupakan perwujudan dalam beragama yang menjadi salah satu tolak ukur menuju keberhasilan pembangunan Kabupaten Kutai Timur. Keimanan dan ketaqwaan adalah landasan moral dan etika yang tidak hanya memiliki muatan spiritual, tetapi juga muatan sosial, sehingga pada prakteknya tidak saja ditunjukkan dengan ketaatan ritual individu, tetapi juga harus diaplikasikan dalam kehidupan sosial, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat untuk merajut kehidupan bersama.

Pembangunan yang berorientasi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, tidak akan lepas dari corak dan tata nilai kedaerahan yang tercermin pada keberadaan seni budaya. Budaya lokal merupakan salah satu sumber nilai yang menunjukkan jati diri, identitas dan kepribadian suatu komunitas masyarakat. Hal ini menjadi benteng pertahanan yang sangat efektif untuk menghadapi dampak negatif dari derasnya arus perubahan. Pada sisi lain, budaya ini juga merupakan modal utama pembangunan untuk mewujudkan keserasian dan keselarasan hidup manusia.

Peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat yang sejahtera dengan mengembangkan program pengentasan kemiskinan dan juga program penurunan angka pengangguran. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan mengembangkan program pengentasan kemiskinan dan program penurunan angka pengangguran. Program ini dapat dilakukan dengan peningkatan ketrampilan angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat juga diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kualitas kesehatan. Peningkatan kualitas pendidikan dapat dilakukan dengan peningkatan fungsi sarana dan prasarana sekolah, peningkatan kualitas tenaga pendidik serta peningkatan kualitas pendidikan. Sedangkan untuk peningkatan kualitas kesehatan juga dilakukan dengan pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas tenaga kesehatan serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.



Misi 2 : Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Berbasis Sektor Pertanian

Pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan kemandirian pengelolaan dan pengadaan pangan daerah yang tertumpu pada produksi. Upaya ini pada dasarnya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya lokal.

Salah satu upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan peningkatan produksi pertanian/ perkebunan/ perikanan, dan juga perlu adanya optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi. Selain itu juga diperlukan peningkatan pengembangan ketrampilan petani, dan peningkatan pengembangan Sumber Daya Manusia dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing adalah Peningkatan peran kelembagaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada sektor pertanian serta peningkatan peran koperasi dalam pengelolaan komoditas unggulan daerah dan UMKM.

Misi 3 : Mewujudkan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata

Pembangunan yang diarahkan untuk lebih meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar dan meningkatkan kualitas pelayanannya. Ketersediaan infrastruktur akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dalam hal pemerataan ekonomi daerah (daya beli masyarakat), tingkat pendidikan, kesehatan dan daya saing daerah terutama pada keberlangsungan pergerakan barang dan jasa berserta akses antar wilayah. Selain itu, ketersediaan infrastruktur menjadi katalisator pencapaian pembangunan pada bidang lainnya.

Pembangunan Infrastruktur harus memperhatikan kapasitas sumber daya yang ada beserta aspek daya dukung lingkungan hidup. Optimalisasi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya fisik serta memperkecil dampak keterpurukan lingkungan dan juga memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah, hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi dampak negatif yang terjadi akibat pembangunan. Sehingga dalam pembangunan infrastruktur diperlukan perubahan pola berfikir dan bertindak dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan, yaitu dengan mengacu pada pembangunan berwawasan lingkungan.



Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat dengan meningkatkan konektivitas antar wilayah, meningkatkan infrastruktur fasilitas perumahan/ pemukiman, serta meningkatkan sarana dan infrastruktur pendukung ekonomi dan juga meningkatkan infrastruktur teknologi dan informasi.

Misi 4 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Partisipatif Berbasis Penegakan Hukum Dan Teknologi Informasi

Penyelenggaraan pemerintah yang diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah secara efektif, efisien dan akuntabel dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang disertai dengan penegakan hukum. Perwujudan pelayanan publik mencakup beberapa aspek, yaitu sumber daya aparatur, regulasi dan kebijakan serta standar pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk menjamin keberlangsungan pemerintahan yaitu dengan lebih meningkatkan profesionalisme birokrasi yang salah satu upaya dalam mewujudkan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur yang bersih. Hal ini memerlukan proses dan komitmen dan seluruh pemangku kepentingan.

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme birokrasi menuju masyarakat Kabupaten Kutai Timur yang maju, mandiri dan berdaya saing, diperlukan suatu upaya yang antara lain: peningkatan kapasitas SDM aparatur sesuai peran dan fungsinya, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, dengan peningkatan pelayanan publik, serta peningkatan pemanfaatan teknologi dengan menata kualitas layanan publik yang berbasis interoperabilitas.

Misi 5: Mewujudkan Sinergitas Pengembangan Wilayah dan Integrasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan

Pembangunan yang diarahkan pada peningkatan pemanfaatan tata ruang dan pembangunan infrastruktur wilayah secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Pemantapan tata ruang wilayah merupakan unsur penunjang utama dalam mendukung terciptanya pembangunan Kabupaten Kutai Timur. Keberadaan kebijakan tata ruang wilayah yang mantap akan mempengaruhi sektor pembangunan yang lain terutama pembangunan infrastruktur dan pengembangan perekonomian khususnya sektor pertanian.



Upaya yang dapat dilakukan untuk pengembangan wilayah yang berwawasan lingkungan dengan cara peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, serta peningkatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.

Untuk prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Timur tahun 2021-2026 pada sektor Pendidikan, yaitu;

1. Gratis Bantuan Seragam dan Buku Sekolah
2. Beasiswa Kutim tuntas bagi pelajar dan mahasiswa
3. Peningkatan Bantuan Operasional Sekolah (BOSDA) negeri dan swasta
4. Peningkatan insentif guru dan tenaga kependidikan
5. Bantuan seragam bagi guru negeri dan swasta
6. Perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana Pendidikan seluruh kecamatan
7. Mendorong pencapaian standar akreditasi A bagi sekolah negeri dan swasta

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk mewujudkan visinya terdapat Misi pertama yaitu Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak Mulia, Berbudaya dan Bersatu. Untuk mewujudkan tujuan itu maka dalam RPJMD telah ditetapkan sasaran yang harus dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencapai tujuan prioritas yaitu meningkatkan taraf pendidikan masyarakat dan terwujudnya SDM yang Beriman, Berakhlak Mulia dan Berbudaya. Sedangkan untuk mencapai tujuan diperlukan indikator agar arah kebijakan dapat berjalan sesuai sasaran. Adapun sasaran yang telah tertuang dalam RPJMD adalah Meningkatkan Taraf Pendidikan Masyarakat. Adapun indikator sasaran dalam RPJMD di Kabupaten Kutai Timur di bidang Sumber Daya Manusia yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang indikatornya adalah **Angka Harapan lama dari 13,10 tahun 2024 menjadi 13,30 tahun pada akhir tahun 2026.**

Selanjutnya Misi ketiga, yaitu Mewujudkan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Secara Proporsional. Adapun sasarannya yaitu, meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan, dengan indikator sasaran, yaitu **Rasio Ketersediaan Sekolah Per Penduduk Usia Sekolah (SD) dari 56,68 tahun 2024 menjadi 56,88 pada akhir tahun 2026, Rasio Ketersediaan Sekolah Per Penduduk Usia Sekolah (SMP) dari 53,36 tahun 2024 menjadi 53,56 pada akhir tahun 2026.**

Misi empat, yaitu Mewujudkan Pemerintahan yang Partisipatif Berbasis Penegakan Hukum dan Teknologi Informasi. Adapun sasarannya, yaitu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, dengan indikator sasaran, yaitu **Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan sebesar 100% tahun 2024 dan pada tahun akhir 2026.**



2.1.2 TELAAHAN RENCANA STRATEGIS K/L DAN RENSTRA

2.1.2.1 Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan Nasional

Dalam rangka mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan sejalan dengan visi Pendidikan nasional, Kemdikbud mempunyai visi 2025 untuk menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kami/Insan Paripurna).

Sebagai kemeterian yang mengemban amanat mengendalikan pembangunan SDM melalui ikhtiar Bersama semua anak bangsa untuk meningkatkan mutu Pendidikan dan memajukan kebudayaan, kemendikbud dalam menentukan visi kementerian berdasarkan pada capaian kinerja, potensi dan permasalahan, Visi Presidean pada RPJMN tahun 2020-2024, serta visi Indonesia 2045. Adapun Visi Kemendikbud 2020-2024 adalah:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global

Sejalan dengan perwujudan visi dan misi tersebut, kemdikbud sesuai dengan tugas dan kewenangannya, juga berkomitmen untuk menciptakan Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama beriman, bertakwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.

Misi Kementerian Pendidikan dan kebudayaan untuk mendukung pencapaian visi Presiden, Kemendikbud sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu menjabarkan misi 1 Peningkatan kualitas manusia Indonesia; misi 5 kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan misi 8 pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Untuk itu, misi kemendikbud dalam melaksanakan Nawacita Kedua tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan Bahasa dan sastra
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan Pendidikan dan Kebudayaan.



2.1.2.2 Telaahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur

Sejalan dengan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945, tujuan dan fungsi Pendidikan nasional sebagaimana tertuang dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ditetapkanlah visi Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 sebagai berikut:

“Berani Untuk Kaltim Berdaulat”

Visi tersebut menjelaskan bahwa:

1. Berani

Pemerintah mempunyai keberanian, tekad dan komitmen yang kuat untuk memaksimal kewenangan yang dimiliki sesuai peraturan perundang-undangan untuk mensejahterakan masyarakat.

2. Berdaulat

- Kalimantan Timur memiliki **kemantapan** dalam pemerintahan, hukum dan pelayanan publik
- Kalimantan Timur mampu mewujudkan **kemandirian** dan dalam ekonomi kerakyatan dan ketercukupan kebutuhan dasar
- Kalimantan Timur mampu mewujudkan **kemandirian** dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
- Kalimantan Timur mampu melahirkan sumber daya manusia berkarakter, berkualitas dan memiliki **daya saing**.

Telaahan terhadap Pendidikan tertuang pada Misi 1 yaitu berdaulat dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas. Misi ini mempunyai tujuan mewujudkan SDM yang berdaya saing, berkarakter dan berakhlak mulia. Strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur adalah peningkatan mutu dan akses Pendidikan melalui:

- Peningkatan kualitas layanan Pendidikan vokasi/kejuruan selaras kebutuhan pasar kerja
- Mendorong pengembangan SMA/SMK Negeri terpadu (Boarding School)
- Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, serta kemampuan pembelajaran berbasis IT
- Pemberian bantuan biaya Pendidikan bagi masyarakat tidak mampu
- Peningkatan sapsras Pendidikan dalam mendukung pembelajaran jarak jauh
- Pengembangan Perpustakaan berbasis IT



2.1.3 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mencapai visi dan misi untuk kurun waktu tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten kutai Timur dituangkan dalam tabel 2.1 sebagai berikut:



TABEL 2.1
TUJUAN DAN SASARAN

No	TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Menata dan Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat dengan Mendorong Kehidupan Masyarakat (SDM) yang berakhlak mulia, berbudaya, dan bersatu.	Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.89	12.90	13.00	13.10	13.20	13.30
			Meningkatnya Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9.19	9.20	9.35	9.45	9.55	10.00
			Meningkatnya Presentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi D-IV/S1	%	97.03	98.03	98.53	99.03	99.53	100.00
2	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang beriman, berakhlak mulia, dan berbudaya	Terwujudnya SDM yang beriman, berakhlak mulia, dan berbudaya	Meningkatnya Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SD	%	98.67	100	100	100	100	100
			Meningkatnya Persentase Sekolah yang Menerapkan	%	86.21	91.95	94.25	95.40	96.55	100



			Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SMP							
3	Menata Semua Layanan Kebutuhan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SD)		56.46	56.48	56.58	56.68	56.78	56.88
			Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SMP)		53.06	53.16	53.26	53.36	53.46	53.56
4	Menata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Transparan, dan Akuntabel Berbasis Elektronik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
5	Menata dan Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat dengan Mendorong Kehidupan Masyarakat (SDM) yang Berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu	Terwujudnya SDM yang beriman berakhlak mulia dan berbudaya	Ketua Adat yang Menerima Insentif	Orang	-	25	25	141	141	141
			Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Kegiatan	5	5	5	6	6	7
			Fasilitasi SDM dan Lembaga Sejarah	Fasilitasi	-	20	20	25	30	35
			Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Deilstarikan	Benda/Situs/Kawasan	42	43	43	43	43	43
			Terpeliharanya Koleksi Benda Cagar Budaya	%	100	100	100	100	100	100



2.1.4 INDIKATOR KINERJA

Untuk mengukur pencapaian kinerja program pembangunan pendidikan di atas, Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur menetapkan berbagai indikator kinerja utama sekaligus targetnya sebagai parameter keberhasilan pada masing-masing pilar tersebut. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Berikut ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024:

TABEL 2.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Target 2024
1	Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	1	Meningkatnya Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,10
		2	Meningkatnya Angka rata-rata lama sekolah (RLS)	9,45
		3	Meningkatnya Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi D-IV/S1	99,03
2	Terwujudnya SDM yang beriman, berakhlak mulia, dan berbudaya	1	Meningkatnya Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SD	100,00
		2	Meningkatnya Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SMP	95,40
		3	Ketua Adat yang Menerima Insentif	141
		4	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	6
		5	Fasilitasi SDM dan Lembaga Sejarah	25
		6	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	43
		7	Terpeliharanya Koleksi Benda Cagar Budaya	100



3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan	1	Rasio Ketersediaan Sekolah Per Penduduk Usia (SD/MI)	56,68
		2	Rasio Ketersediaan Sekolah Per Penduduk Usia (SMP/MTs)	53,36

TABEL 2.3
INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Pendukung	Target 2024
1	Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	96,66
		2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	64,84
		3	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (APK PAUD)	69,57
		4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI/ Paket A	103,71
		5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/ Paket B	79,37
		6	Angka Partsipasi Sekolah (APS) 7-12	100,00
		7	Angka Partsipasi Sekolah (APS) 13-15	100,00
		8	Rasio Murid/Guru (SD)	20
		9	Rasio Murid/Guru (SMP)	20
		10	Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI	0,10
		11	Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs	0,10
		12	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100,00
		13	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100,00
		14	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	83,46
2	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan	1	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	61,45
		2	Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	60,99
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan	100.00



2.1.5 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 dirumuskan berdasarkan visi, misi, tujuan strategis Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, serta mengacu kepada RPJMD 2021-2026 dan evaluasi capaian pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sampai tahun 2024. Strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur tahun 2024 disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta seluruh pelaksana pada tingkat satuan pendidikan dalam lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan cara-cara yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang menggambarkan tujuan-tujuan strategis. Telaahan terhadap sasaran strategis yang telah diuraikan terdahulu akan terlihat sejumlah unsur yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan layanan prima pendidikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur.



TABEL 2.4
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

VISI : Menata Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua				
MISI I : Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak Mulia, Berbudaya dan Bersatu				
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Menata dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan mendorong kehidupan masyarakat (SDM) yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu. (M1.T1)	Meningkatnya taraf Pendidikan masyarakat (M1.T1.S2)	Peningkatan taraf pendidikan (M1.T1.S2.ST1)	1. Percepatan wajib belajar 9 tahun bagi anak dari masyarakat yang tidak mampu melalui BOSDA dan Beasiswa Kutim Tuntas. (M1.T1.S2.ST1.AK1)
				2. Pemberian Beasiswa bagi masyarakat yang tidak mampu (M1.T1.S2.ST1.AK2)
				3. Peningkatan kualitas Pendidik dan Tenaga Pendidik secara merata (M1.T1.S2.ST1.AK3)
				4. Penguatan kelembagaan sekolah melalui peningkatan akreditasi (M1.T1.S2.ST1.AK4)
		4. Terwujudnya SDM yang beriman, berakhlak mulia dan Berbudaya (M1, T1, S4)	Meningkatnya Pengamalan nilai-nilai budaya dan keagamaan di masyarakat (M1, T1, S4, ST1)	1. Peningkatan Pengamalan nilai-nilai agama dan budaya di lingkungan Pendidikan sebagai muatan lokal (M1, T1, S4, ST1, AK1)
MISI III : Mewujudkan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Secara Proporsional				
2	Menata semua layanan kebutuhan infrastruktur dasar dan Ekonomi Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata (M3.T1)	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan (M3.T1.S4)	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan (M3.T1.S4.ST1)	Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah (M3.T1.S4.ST1.AK1)



MISI IV : Mewujudkan Pemerintahan yang Partisipatif berbasis penegakan Hukum dan Teknologi Informasi				
3	Menata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik (M4, T1)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan (M4, T1, S1)	Peningkatan Efisiensi pada berbagai pelayanan public berbasis elektronik/ teknologi informasi (M4, T1, S1, ST1)	Peningkatan Akuntabilitas Publik kapasitas Pemerintahan (<i>capacity building</i>) (M4, T1, S1, ST1, AK2)



2.1.6. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mendukung ketercapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024 tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur menetapkan program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur, dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 2.5
PROGRAM DAN KEGIATAN

No.	Program	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
				3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
				5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
				6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
				3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
				4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
				5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
		3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya



				2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
				3	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
				4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				3	Fasilitasi Kunjungan Tamu
				4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				5	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
				6	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
		5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				2	Pengadaan Mebel
				3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	Program Pengelolaan Pendidikan	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
				2	Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU
				3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
				4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah



				5	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
				6	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah
				7	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU
				8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
				9	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
				10	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah
				11	Pengadaan Mebel Sekolah
				12	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
				13	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah
				14	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
				15	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
				16	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
				17	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
				18	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
				19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
				20	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar
				21	Pemeliharaan Mebel Sekolah
				22	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
				23	Pengembangan konten digital untuk pendidikan



				24	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
				25	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
				26	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
				27	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
				28	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
				29	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
				30	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
				31	Pembangunan Ruang Kelas Baru
				32	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
				33	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
				34	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
				35	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
				36	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
		2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1	Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU
				2	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
				5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
				6	Pembangunan Laboratorium
				7	Pembangunan Ruang Serba Guna/ Aula
				8	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah



				9	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
				10	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Sekolah
				11	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas
				12	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru Sekolah
				13	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
				14	Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan Sekolah
				15	Rehabilitasi Sedang/ Berat Laboratorium
				16	Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
				17	Pengadaan Mebel Sekolah
				18	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
				19	Pengadaan Perlengkapan Siswa
				20	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
				21	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
				22	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Peserta Didik
				23	Penyediaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
				24	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
				25	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana bos Sekolah Dasar
		3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1	Pembangunan Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD
				2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
				3	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD
				4	Pengadaan Mebel PAUD
				5	Pengadaan Perlengkapan PAUD



		4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	6	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
				7	Pengelolaan Dana BOP PAUD
				1	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan
				2	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan
				3	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan
				4	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan
				5	Penyelenggaraan Ujian Bagi Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan



2.1.7. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur sebagai salah satu SKPD Kabupaten Kutai Timur dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan harus mengacu kepada ketentuan perundang-undangan baik di Pusat, Provinsi, maupun Daerah Kabupaten Kutai Timur, hal tersebut sebagai konsekuensi logis karena penyelenggaraan kewenangan di bidang pendidikan tidak semua diserahkan kepada pemerintah daerah, tetapi ada yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) merupakan dasar hukum bahwa tugas pemerintahan dibidang pendidikan ditetapkan didalam satu sistem pendidikan nasional.

Mengacu kepada kewenangan dan strukturisasi program dan kegiatan tersebut maka dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur ini ditetapkan program-program pembangunan bidang pendidikan yang dihubungkan dengan tujuan yang akan dicapai dalam visi, misi, arah kebijakan dan tujuan pembangunan pendidikan tahun 2021-2026.

TABEL 2.6
RENCANA KINERJA TAHUNAN

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Target 2024
1	Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	1	Angka rata-rata lama sekolah	9,45
		2	Angka Harapan Lama Sekolah	13,10
		3	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	69,57
		4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	103,71
		5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	79,37
		6	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun	100,00
		7	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun	100,00
		8	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	96,66
		9	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	64,84
		10	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,10
		11	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,10
		12	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100.00
		13	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100,00



		14	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	83,46
		15	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	99,03
		16	Rasio Murid/guru (SD)	20
		17	Rasio Murid/guru (SMP)	20
2	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan	1	Rasio Ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah (SD)	56,68
		2	Rasio Ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah (SMP)	56,36
		3	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	61,45
		4	Sekolah pendidikan SMP/MTS kondisi bangunan baik	60,99
3	Terwujudnya SDM yang beriman, berakhlak mulia, dan berbudaya	1	Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SD	100,00
		2	Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SMP	95,40
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan	100,00
5	Terwujudnya SDM yan beriman, berakhlak mulia, dan berbudaya	1	Jumlah Ketua Adat yang Menerima Insentif	150
		2	Penyelenggaraan Festival dan Seni Budaya	6
		3	Fasilitasi SDM dan Lembaga Sejarah	10
		4	Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	44
		5	Terpeliharanya Koleksi Benda Cagar Budaya	100,00



LAMPIRAN I
MATRIKS RENSTRA 2021-2026
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.89	12.89	12.90	13.00	13.10	13.20	13.30
2.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9.19	9.19	9.20	9.35	9.45	9.55	10.00
3.	Presentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi D-IV/S1	%	97.03	97.03	98.03	98.53	99.03	99.53	100.00
4.	Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SD	%	98.67	98.67	100	100	100	100	100
5.	Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SMP	%	86.21	86.21	91.95	94.25	95.40	96.55	100
6.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SD)		56.46	56.46	56.48	56.58	56.68	56.78	56.88
7.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SMP)		53.06	53.06	53.16	53.26	53.36	53.46	53.56
8.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100	100	100	100	100



9.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100	100	100	100	100	100
10.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	90.66	90.66	92.66	94.66	96.66	98.66	100
11.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	58.84	58.84	60.84	62.84	64.84	66.84	70.00
12.	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	60.57	60.57	63.57	66.57	69.57	72.57	75.57
13.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	97.71	97.71	99.71	101.71	103.71	105.71	107.71
14.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	73.37	73.37	75.37	77.37	79.37	81.37	83.37
15.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12	%	94.12	94.12	95.12	96.12	97.12	98.12	100
16.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15	%	66.30	66.30	68.30	70.30	72.30	74.30	76.30
17.	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	%	52.45	52.45	55.45	58.45	61.45	64.45	67.45
18.	Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	%	51.99	51.99	54.99	57.99	60.99	63.99	66.99
19.	Rasio Murid/Guru (SD)		17.84	17.84	20	20	20	20	20
20.	Rasio Murid/Guru (SMP)		14.92	14.92	20	20	20	20	20
21.	Angka Putus Sekolah (AptS) SD/MI	%	0.28	0.28	0.20	0.15	0.10	0.05	0.00
22.	Angka Putus Sekolah (AptS) SMP/MTs	%	0.19	0.19	0.16	0.13	0.10	0.05	0.00
23.	Angka Melanjutan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	77.46	77.46	79.46	81.46	83.46	85.46	87.46
24.	Guru yang Sudah Sertifikasi	%	31.96	31.96	41.96	51.96	61.96	71.96	81.96



25.	Presentase PKBM yang terkreditasi	%	25.00	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00
26.	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
27.	Tokoh Adat yang Menerima Insentif				100	125	150	175	200
28.	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya		5	5	5	5	6	6	7
29.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan		42	42	43	44	44	45	45
30.	Fasilitasi SDM dan Lembaga Sejarah		8	8	8	9	10	11	12
31.	Terpeliharanya Koleksi Benda Cagar Budaya		100	100	100	100	100	100	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan dan dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang bersangkutan.

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur adalah perwujudan kewajiban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Pengukuran Kinerja merupakan inti dari akuntabilitas kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan (Kegiatan) sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Pengukuran tersebut merupakan suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa, *Input*, *Output* dan *Outcome*. Pengukuran tersebut dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja baik dari Internal Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur, berasal dari sistem informasi yang ada maupun dari Eksternal Pemerintah.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur berkewajiban untuk merealisasikan setiap target kinerja dalam sasaran strategis. Keberhasilan pencapaian target kinerja merupakan ukuran keberhasilan/kegagalan setiap program. Dengan tercapainya target kinerja tersebut diharapkan akan memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan. Pada Pelaporan LKJ-IP tahun 2024 ini ada perubahan nilai target dari tahun sebelumnya dikarenakan disesuaikan dengan Target RPJMD Kabupaten Kutai Timur dan Renstra (Rencana Strategis) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur dengan melihat Capaian 2 (dua) Tahun sebelumnya yaitu 2022-2023. Penentuan target ini juga disesuaikan dengan kondisi Negara Indonesia yang mengalami Bencana Nasional pada awal tahun 2020 yang berdampak langsung terhadap Kondisi Keuangan Kabupaten Kutai Timur, sehingga perlu dilakukan penyesuaian penggunaan anggaran untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, skala pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut:



TABEL 3.1
SKALA PENGUKURAN KINERJA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

NO	SKALA CAPAIAIN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik (AA)
2	75-100%	Baik (B)
3	55-74%	Cukup (C)
4	Kurang dari 55%	Kurang (D)

TABEL 3.2
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	1	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,10	13,02	99,39
		2	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,45	9,47	100,21
		3	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	99,03	100,00	100,98
		4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	96,66	94,15	97,40
		5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	64,84	84,86	130,88
		6	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	69,57	94,37	135,65
		7	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	103,71	105,67	101,89
		8	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	79,37	106,65	134,37
		9	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12	%	100,00	99,88	99,88
		10	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15	%	100,00	99,03	99,03
		11	Rasio Murid/Guru (SD)		20	15,92	79,60
		12	Rasio Murid/Guru (SMP)		20	14,16	70.80



		13	Angka Putus Sekolah (AptS) SD/MI	%	0,10	0,03	100,07
		14	Angka Putus Sekolah (AptS) SMP/MTs	%	0,10	0,11	99,99
		15	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100,00	100,00	100,00
		16	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100,00	100,00	100,00
		17	Angka Melanjutan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	83,46	88,80	106,40
2	Terwujudnya SDM yang beriman, berakhlak mulia, dan berbudaya	1	Meningkatnya Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SD	%	100,00	100,00	100,00
		2	Meningkatnya Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SMP	%	95,40	100,00	104,82
3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan	1	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SD)	Rasio	56,68	45,96	81,09
		2	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SMP)	Rasio	53,36	43,13	80,83
		3	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	%	61,45	98,25	159,89
		4	Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	%	60,99	95,37	156,37
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan	%	100,00	100,00	100,00



4.	Terwujudnya SDM yang beriman, berakhlak mulia, dan berbudaya	1.	Jumlah Ketua Adat yang Menerima Insentif	Orang	150	150	100,00
		2.	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Kegiatan	6	7	116,67
		3.	Fasilitasi SDM dan Lembaga Sejarah	Fasilitasi	10	45	450,00
		4.	Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Benda/ Situs/ Kawasan	44	66	150,00
		5.	Terperliharnya Koleksi Benda Cagar Budaya	%	100,00	100,00	100,00

Indikator merupakan suatu konsep dan sekaligus ukuran. Sebagai suatu konsep, indikator merupakan besaran kuantitatif mengenai suatu konsep tertentu yang dapat digunakan untuk mengukur proses dan hasil pendidikan atau tampak dari suatu instrumen kebijakan pendidikan. Sebagai ukuran kuantitatif, indikator merupakan besaran dari suatu keadaan empiris dari suatu keadaan empiris dari suatu konsep atau gejala tertentu sebagai hasil pengolahan dari dua satuan data atau lebih dalam waktu yang bersamaan. Indikator juga didefinisikan sebagai perbandingan antara dua atau lebih variabel sehingga dapat diinterpretasikan.

Indikator tidak dapat dipisahkan dari data bahkan saling bergabung satu sama lain. Indikator tidak mungkin dihasilkan tanpa dukungan data, sebaliknya data tidak memiliki acuan konseptual apapun tanpa dilakukannya definisi tentang indikator. Besaran indikator ini merupakan informasi yang berguna karena dapat dijadikan ukuran yang standar untuk menilai keberhasilan suatu program.

Angka partisipasi, sebagai salah satu indikator pendidikan penting diketahui. Dengan mengetahui angka partisipasi tersebut dapat dinilai apakah kegiatan tersebut disukai atau tidak disukai masyarakat. Semakin besar angka partisipasi suatu program pendidikan berarti program sukses dilaksanakan oleh lembaga disuatu daerah secara profesional. Sebaliknya jika kurang atau bahkan peserta banyak berhenti dalam proses pelaksanaan program berarti program tidak sukses dilaksanakan oleh lembaga. Berikut penjelasan dari tabel diatas adalah sebagai berikut:

3.1.1. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan salah satu indikator untuk mengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mewakili dimensi Pendidikan. HLS merupakan indikator

yang menggambarkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS merupakan salah satu output yang dapat digunakan untuk memotret pemerataan pembangunan Pendidikan di Indonesia. Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk mengenyam Pendidikan dan meningkatnya fasilitas Pendidikan merupakan faktor pendukung meningkatnya angka Harapan Lama Sekolah (HLS). Langkah-langkah perhitungan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah sebagai berikut:

1. Menghitung jumlah penduduk menurut umur usia 7 tahun ke atas (P_i)
2. Menghitung jumlah penduduk yang masih sekolah menurut umur usia 7 tahun ke atas (E_i)
3. Menghitung rasio penduduk yang masih sekolah terhadap jumlah penduduk menurut umur usia 7 tahun ke atas (E_i/P_i). Langkah ini menghasilkan partisipasi sekolah menurut umur.
4. Menjumlahkan harapan lama sekolah, yaitu dengan menjumlahkan semua partisipasi sekolah menurut umur (7 tahun ke atas) atau secara matematis rumus harapan lama sekolah dihitung menggunakan rumus:

$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Dimana:

HLS_a^t = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t
 E_i^t = Jumlah Penduduk Usia i yang bersekolah pada tahun t
i = Usia (a, a+1, ..., n)
FK = Faktor Koreksi Pesantren

Misal Harapan Lama Sekolah adalah 12,90 berarti anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang/harapan untuk menamatkan Pendidikan mereka hingga lulus SMA atau D1.

3.1.2 Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan dilakukan pada penduduk yang berusia 25 tahun keatas dimana diasumsikan seseorang yang telah berumur 25 tahun, maka proses pendidikannya telah berakhir. Pada kondisi normal rata-rata lama sekolah di suatu wilayah tidak akan turun. Batas nilainya adalah minimum 0 dan maksimum 15 tahun. Untuk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Angka RLS menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka lamanya bersekolah maka semakin tinggi jenjang Pendidikan yang telah dicapai penduduk, sehingga



indikator ini sangat penting karena dapat menunjukkan kualitas Sumber Daya Manusia di suatu wilayah.

Langkah-langkah perhitungan rata-rata lama sekolah adalah sebagai berikut:

- 1. Melakukan seleksi terhadap penduduk usia 25 tahun keatas
- 2. Mengelompokkan jenjang Pendidikan yang pernah/sedang diduduki
- 3. Mengelompokkan ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki
- 4. Mengkonversi tahun lama sekolah menurut ijazah terakhir

Ijazah Terakhir	Lama Sekolah (Tahun)
Tidak Punya Ijazah	0
SD/SDLB/MI/Paket A	6
SMP/SMPLB/MTs/Paket B	9
SMA/SMLB/MA/SMK/Paket C	12
D1/D2	14
D3/Sarjana Muda	15
D4/S1	16
S2/S3	18

- 5. Menghitung lamanya bersekolah

Rumus Rata-rata Lama Sekolah adalah sebagai berikut:

$$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$$

Dimana :

- RLS* = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas
- Xi* = Lama Sekolah penduduk ke-*i* yang berusia 25 tahun
- N* = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas

Misal Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah 9,43 berarti secara rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas pendidikannya telah mencapai 9,43 tahun atau setara dengan jenjang SMP kelas IX.

3.1.3 Guru yang memenuhi Kualifikasi D-IV /S1

Guru yang memenuhi Kualifikasi D-IV/S1 merupakan persentase antara jumlah guru yang menamatkan Pendidikan minimal D-IV/S1 dengan jumlah guru keseluruhan. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi D-IV/S1 di hitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{Jumlah\ Guru\ berijazah\ Kualifikasi\ S1 / DIV}{Jumlah\ Guru\ SD / MI + SMP / MTs} \times 100\%$$

3.1.4 Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SD dan SMP

Persentase Sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal ini jika berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan yaitu Kurikulum Pendidikan dasar dan menengah wajib memuat muatan lokal, jadi muatan lokal yang dimaksud ini sudah terimplementasi dengan kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang masuk di dalam Buku Pembelajaran Tematik maka sekolah yang menerapkan yaitu 100%. Jika Persentase muatan lokal ini berdasarkan Sekolah yang memiliki buku/modul muatan lokal maka sekolah di Kabupaten Kutai Timur belum ada yang menerapkan. Hal ini terkendala karena belum adanya alokasi anggaran untuk Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal, Penyusunan Silabus Muatan Lokal dan Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal, Untuk data yang di sajikan pada tabel diatas merupakan data sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal yang terimplementasi dengan Ekstrakurikuler. Adapun Rumus untuk menghitung persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Sekolah SD yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal}}{\text{Jumlah Sekolah SD}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Jumlah Sekolah SMP yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal}}{\text{Jumlah Sekolah SMP}} \times 100\%$$

3.1.5 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD dan SMP

Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD dan SMP adalah jumlah sekolah SD dan SMP yang di bandingkan dengan penduduk usia sekolah, penduduk usia sekolah SD 7-12 tahun dan penduduk usia sekolah SMP 13-15 tahun. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk usia sekolah di hitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Sekolah SD/MI}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7 s.d 12 Thn}} \times 10.000$$

$$\frac{\text{Jumlah Sekolah SMP/MTs}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 13 s.d 15 Thn}} \times 10.000$$



3.1.6 Angka Kelulusan (AL)

Persentase jumlah siswa tingkat tinggi yang lulus dari jenjang Pendidikan tertentu.

Angka Kelulusan di hitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AL = \frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi SD dan SMP yang mengikuti ujian}} \times 100 \%$$

3.1.7 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai. Misalnya, anak usia 7 – 12 tahun yang merupakan usia sekolah dijenjang SD bersekolah dijenjang SD.

Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut atau dengan kata lain penduduk sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu.

Semakin tinggi APM berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai. Nilai ideal APM = 100 persen. Dimana nilai 100 persen akan tercapai apabila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu. Angka Partisipasi Murni dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Siswa Usia 7–12 Tahun yang bersekolah di SD/MI}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7 –12 Thn}} \times 100\%$$
$$\frac{\text{Jumlah Siswa Usia 13–15 Tahun yang bersekolah di SMP/MTs}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 13 –15 Thn}} \times 100\%$$

3.1.8 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu (PAUD, SD dan SMP) dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Dari APK dapat menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di



suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena terdapat murid yang berusia diluar usia resmi sekolah. Adanya siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar di jenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda. Oleh karena itu, perlu hati-hati dalam menafsirkan APK karena APK mengandung keluar masuknya anak-anak di atas atau dibawah usia sekolah yang bersangkutan. Angka partisipasi Kasar (APK) di hitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Siswa yang bersekolah di PAUD}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 5 – 6 Thn}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Jumlah Siswa yang bersekolah di SD/MI/PaketA}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7 – 12 Thn}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Jumlah Siswa yang bersekolah di SMP/MTs/PaketB}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 13 – 15 Thn}} \times 100\%$$

3.1.9 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada jenjang pendidikan SD dan SMP dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan.

Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Nilai ideal APS = 100 persen dan tidak akan terjadi lebih besar dari 100 persen, karena murid usia sekolah dihitung dari murid yang ada di semua jenjang pendidikan pada suatu daerah. Angka 100 persen akan tercapai apabila seluruh penduduk usia sekolah di suatu wilayah telah tertampung atau dapat bersekolah. Penduduk kelompok umur sekolah dapat dibedakan menjadi penduduk dengan umur 7-12 tahun dan penduduk dengan umur 13-15 tahun. Angka Partisipasi Sekolah (APS) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Siswa Usia 7–12 Tahun}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7 – 12 Thn}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Jumlah Siswa Usia 13–15 Tahun}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 13 – 15 Thn}} \times 100\%$$



3.1.10 Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik

Salah satu pendukung kelancaran proses belajar mengajar adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Salah satunya adalah kondisi ruang kelas yang digunakan untuk belajar. Dalam pembahasan berikut menampilkan tiga jenis kondisi ruang kelas, yaitu baik, rusak ringan, dan rusak berat. Disebut sebagai rusak berat jika mengalami kerusakan minimal 45-56 persen. Persentase Ruang Kelas kondisi bangunan baik bisa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Ruang Kelas dengan Kondisi Bangunan Baik SD/MI}}{\text{Jumlah Ruang Kelas Keseluruhan SD/MI}} \times 100\%$$
$$\frac{\text{Jumlah Ruang Kelas dengan Kondisi Bangunan Baik SMP/MTs}}{\text{Jumlah Ruang Kelas Keseluruhan SMP/MTs}} \times 100\%$$

3.1.11 Rasio Siswa per Guru (R-S/G)

Rasio siswa per guru (R-S/G) dapat didefinisikan merupakan perbandingan antar jumlah siswa dengan jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu. Hasil perhitungan angka ini dapat digunakan untuk mengetahui rata-rata guru yang dapat melayani siswa disuatu sekolah pada jenjang pendidikan tertentu. Jika rasio siswa per guru ini tinggi, ini berarti satu orang tenaga pengajar harus melayani banyak murid. Banyaknya murid yang diajarkan/dilayani oleh seorang guru akan mengurangi daya tangkap murid pada pelajaran yang diberikan atau mengurangi efektivitas pengajaran. Rasio Siswa per Guru (R-S/G) dapat di hitung denga rumus sebagai berikut:

$$R-SG = \frac{\text{Jumlah siswa pada jenjang pendidikan SD/MI}}{\text{Jumlah guru pada jenjang pendidikan SD/MI}}$$
$$R-SG = \frac{\text{Jumlah siswa pada jenjang pendidikan SMP/MTs}}{\text{Jumlah guru pada jenjang pendidikan SMP/MTs}}$$

3.1.12 Angka Putus Sekolah (APtS)

Angka Putus Sekolah (APts) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SMP, SMA dan sebagainya) dengan jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu dan dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan APtS ini digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa putus sekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu.Semakin tinggi AptS berarti semakin banyak siswa yang putus sekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Angka Putus Sekolah (APtS) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$APtS = \frac{\text{Jumlah siswa putus sekolah pada jenjang SD}}{\text{Jumlah Siswa pada jenjang SD}} \times 100 \%$$



$$APtS = \frac{\text{Jumlah siswa putus sekolah pada jenjang SMP}}{\text{Jumlah Siswa pada jenjang SMP}} \times 100 \%$$

3.1.13 Angka Melanjutkan (AM)

Angka Melanjutkan (AM) didefinisikan sebagai persentase jumlah lulusan yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Angka Melanjutkan (AM) berguna untuk mengetahui banyaknya lulusan yang dapat melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi atau daya serap sekolah yang lebih tinggi.

Angka Melanjutkan (AM) yang idealnya sebesar 100 persen. Angka Melanjutkan (AM) 100 persen berarti semua lulusan pada jenjang pendidikan tertentu dapat ditampung di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dengan demikian semakin tinggi Angka Melanjutkan (AM) dari suatu daerah semakin baik. Angka Melanjutkan (AM) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AM = \frac{\text{Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang pendidikan SMP/MTs}}{\text{Jumlah lulusan pada jenjang pendidikan yg lebih rendah pada tahun ajaran sebelumnya jenjang SD/MI}} \times 100\%$$

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

TABEL 3.3 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN AJARAN 2023/2024 DAN 2024/2025

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Renstra Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja		Rasio Capaian	
		2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=5/3*100)	(8=6/4*100)
1	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,00	13,10	13,01	13,02	100,08	99,39
2	Angka Rata-rata lama sekolah (RLS)	9,35	9,45	9,45	9,47	101,07	100,21
3	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	98,53	99,03	100,00	100,00	101,49	100,98
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	94,66	96,66	95,70	94,15	101,10	97,40
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	62,84	64,84	66,51	84,86	105,84	130,88



6	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	66,57	69,57	90,15	94,37	135,42	135,65
7	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	101,71	103,71	104,00	105,67	102,26	101,89
8	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	77,37	79,37	82,86	106,65	107,10	134,37
9	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12	96,12	100,00	99,83	99,88	103,86	99,88
10	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15	70,30	100,00	70,05	99,03	99,64	99,03
11	Rasio Murid/Guru (SD/MI)	20,00	20,00	16,19	15,92	80,95	79,60
12	Rasio Murid/Guru (SMP/MTs)	20,00	20,00	13,38	14,16	66,90	70,80
13	Angka Putus Sekolah (AptS) SD/MI	0,15	0,10	0,04	0,03	100,11	100,07
14	Angka Putus Sekolah (AptS) SMP/MTs	0,13	0,10	0,17	0,11	99,96	99,99
15	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	81,46	83,46	80,05	88,80	98,27	106,40
19	Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SMP	94,25	95,40	100,00	100,00	106,10	104,82
21	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SD/MI)	56,58	56,68	45,18	45,96	79,85	81,09
22	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SMP/MTs)	53,26	53,36	43,64	43,13	81,94	80,83



23	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	58,45	61,45	76,77	98,25	131,34	159,89
24	Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	57,99	60,99	92,03	95,37	158,70	156,37
25	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
26	Jumlah Ketua Adat yang Menerima Insentif	25	150	103	150	412,00	100,00
27	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	5	6	7	7	140,00	116,67
28	Fasilitasi SDM dan Lembaga Sejarah	20	10	25	45	125,00	450,00
29	Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	43	44	43	66	100,00	150,00
30	Terperliharnya Koleksi Benda Cagar Budaya	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Program

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat

1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	Kategori
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	100,08	13,10	13,02	99,39	B
Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	101,07	9,45	9,47	100,21	AA

Dalam sasaran ini target indikator Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 13,10 tahun dan realisasi sebesar 13,02 tahun menghasilkan persentase capaian pada tahun 2024 sebesar 99,39%. Persentase capaian ini menurun dibandingkan dengan capaian tahun 2023, yaitu sebesar 100,08%. Dari hasil tersebut Angka Harapan Lama Sekolah, masuk dalam kategori baik.



Indikator kedua adalah angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dengan target indikator Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 9,45 tahun dan realisasi sebesar 9,47 tahun menghasilkan persentase capaian pada tahun 2024 sebesar 100,21%. Persentase ini menurun dibandingkan dengan capaian tahun 2023, yaitu 101,07%. Dari hasil tersebut Angka Rata-Rata Lama Sekolah, termasuk dalam kategori sangat baik.

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	Kategori
Peningkatan Kualifikasi Guru (D4/S1/S2)	%	101,49	99,03	100,00	100,98	AA

Dalam sasaran ini target indikator Peningkatan kualifikasi guru (D4/S1/S2) sebesar 99,03% dan realisasi sebesar 100,00% sehingga persentase capaian pada tahun 2024 sebesar 100,98%. Capaian ini menurun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 101,49%. Dari hasil tersebut peningkatan kualifikasi guru (D4/S1/S2) dalam kategori sangat baik.

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	Kategori
APM SD/MI	%	101,10	96,66	94,15	97,40	B
APM SMP/MTs	%	105,84	64,84	84,86	130,88	AA

Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SD/MI pada tahun 2024 dengan target 96,66% dan realisasi 94,15% maka diperoleh persentase capaian sebesar 97,40%. Capaian ini meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 101,10%. Dengan Pencapaian tersebut Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SD/MI dalam kategori baik.

Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SMP/MTs pada tahun 2024 dengan target 64,84% dan realisasi 84,86% maka diperoleh persentase capaian sebesar 130,88%. Capaian ini meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 105,84%. Dengan Pencapaian tersebut maka Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SMP/MTs masuk dalam kategori sangat baik.



Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	Kategori
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	135,42	69,57	94,37	135,65	AA
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	102,26	103,71	105,67	101,89	AA
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	107,10	79,37	106,65	134,37	AA

Dalam sasaran ini target indikator angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar 69,57% dan realisasi sebesar 94,37% sehingga persentase capaian pada tahun 2024 sebesar 135,65%. Capaian ini meningkat jika dibandingkan tahun 2023 sebesar 135,42%. Dari hasil tersebut Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) masuk dalam kategori sangat baik.

Dalam sasaran ini target indikator angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/Paket A sebesar 103,71% dan realisasi sebesar 105,67% sehingga persentase capaian pada tahun 2024 sebesar 101,89 %. Capaian ini menurun dibandingkan tahun 2023 sebesar 101,89%. Dari hasil tersebut Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A masuk dalam kategori sangat baik.

Dalam sasaran ini target indikator angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/Paket B sebesar 79,37% dan realisasi sebesar 106,65% sehingga persentase capaian pada tahun 2024 sebesar 134,37%. Capaian ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 107,10%. Dari hasil tersebut Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B masuk dalam kategori sangat baik.

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	Kategori
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12	%	103,86	100,00	99,88	99,88	B
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15	%	99,64	100,00	99,03	99,03	B

Dalam sasaran ini target indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 sebesar 100,00% dan realisasi sebesar 99,88% sehingga persentase capaian pada tahun 2024 sebesar



99,88%. Capaian ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 103,86%. Dari hasil tersebut Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 masuk dalam kategori baik.

Dalam sasaran ini target indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 sebesar 100,00% dan realisasi sebesar 99,03% sehingga persentase capaian pada tahun 2024 sebesar 99,03%. Capaian ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 99,64%. Dari hasil tersebut Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 masuk dalam kategori baik.

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	Kategori
Rasio Murid/Guru (SD/MI)	%	80,95	20,00	15,92	79,60	B
Rasio Murid/Guru (SMP/MTs)	%	66,90	20,00	14,16	70,80	C

Dalam sasaran ini target indikator Rasio Murid/Guru (SD/MI) sebesar 20,00% dan realisasi sebesar 15,92% sehingga persentase capaian pada tahun 2024 sebesar 79,60%. Capaian ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 80,95%. Dari hasil tersebut Rasio Murid/Guru (SD/MI) masuk dalam kategori baik.

Dalam sasaran ini target indikator Rasio Murid/Guru (SMP/MTs) sebesar 20,00% dan realisasi sebesar 11,48% sehingga persentase capaian pada tahun 2024 sebesar 70,80%. Capaian ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 66,90%. Dari hasil tersebut Rasio Murid/Guru (SMP/MTs) masuk dalam kategori cukup.

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	Kategori
Angka Putus Sekolah (APTs) SD/MI	%	100,11	0,10	0,03	100,07	AA
Angka Putus Sekolah (APTs) SMP/MTs	%	99,96	0,10	0,11	99,99	B

Indikator Angka Putus Sekolah (APTs) untuk jenjang SD/MI pada tahun 2024 dengan target 0,10% dan realisasi 0,03% maka menghasilkan persentase capaian sebesar 100,07%. Capaian ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 100,11%. Dengan



Pencapaian tersebut Angka Putus Sekolah(APTs) untuk jenjang SD/MI masih mencapai target yang diinginkan dan masuk dalam kategori sangat baik.

Indikator Angka Putus Sekolah (APTs) untuk jenjang SMP/MTS pada tahun 2024 dengan target 0,10% dan realisasi 0,11% maka diperoleh persentase capaian sebesar 99,99%. Capaian tahun 2024 meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2023, capaian tahun 2023 sebesar 99,96%. Dengan Pencapaian tersebut Angka Putus Sekolah (APTs) untuk jenjang SMP/MTS termasuk dalam kategori baik.

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	Kategori
Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	%	98,27	83,46	88,80	106,40	AA

Indikator Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs pada tahun 2024 dengan target 83,46% dan realisasi 88,80% maka menghasilkan persentase capaian sebesar 106,40%. Persentase capaian tahun 2024 menurun jika dibandingkan persentase capaian tahun 2023. Dengan Pencapaian tersebut Angka Melanjutkan(AM) dari SD/MI ke SMP/MTs masuk dalam kategori sangat baik.

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	Kategori
Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	B
Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SMP	%	106,10	95,40	100,00	104,82	AA

Dalam sasaran ini target indikator Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SD sebesar 100,00% dan realisasi sebesar 100,00% sehingga persentase capaian pada tahun 2024 sebesar 100,00%. Capaian ini sama dengan tahun 2023.



Dari hasil tersebut Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SD masuk dalam kategori baik.

Dalam sasaran ini target indikator Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SMP sebesar 95,40% dan realisasi sebesar 100,00% sehingga persentase capaian pada tahun 2024 sebesar 104,82%. Capaian ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 106,10%. Dari hasil tersebut Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SMP masuk dalam kategori sangat baik.

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	Kategori
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SD/MI)	%	79,85	56,68	45,96	81,09	B
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SMP/MTs)	%	81,94	53,36	43,13	80,83	B
Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	%	131,34	61,45	98,25	159,89	AA
Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	%	158,70	60,99	95,37	156,37	AA

Dalam sasaran ini target indikator Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah (SD/MI) sebesar 56,68% dan realisasi sebesar 45,96% sehingga persentase capaian pada tahun 2024 sebesar 81,09%. Capaian ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 79,85%. Dari hasil tersebut Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah (SD/MI) masuk dalam kategori baik.

Dalam sasaran ini target indikator Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah (SMP/MTs) sebesar 53,36% dan realisasi sebesar 43,13% sehingga persentase capaian pada tahun 2024 sebesar 80,83%. Capaian ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2023 81,94%. Dari hasil tersebut Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah (SMP/MTs) masih dalam kategori baik.



Indikator Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik pada tahun 2024 dengan target 61,45% dan realisasi 98,25% maka menghasilkan persentase capaian sebesar 159,89%. Persentase capaian tahun 2024 meningkat jika dibandingkan persentase capaian tahun 2023. Dengan Pencapaian tersebut Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik masuk dalam kategori sangat baik.

Indikator Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik pada tahun 2024 dengan target 60,99% dan realisasi 95,37% maka menghasilkan persentase capaian sebesar 156,37%. Persentase capaian tahun 2024 menurun jika dibandingkan persentase capaian tahun 2023. Dengan Pencapaian tersebut Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik masuk dalam kategori sangat baik.

2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun Lalu	Persentase Kenaikan/Penurunan Realisasi Tahun 2024 Vs Tahun -
				2023	2023
1	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,02	13,01	0,01
2	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,47	9,45	0,02

Dalam sasaran ini indikator Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun 2024 realisasi meningkat dibandingkan dengan realisasi tahun 2023. Persentase kenaikan realisasi tersebut meningkat sebesar 0,01 tahun dibandingkan tahun 2023.

Dalam sasaran ini indikator Angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2024 realisasi meningkat dibandingkan dengan realisasi tahun 2023. Persentase kenaikan realisasi tersebut meningkat sebesar 0,02 tahun dibandingkan tahun 2023.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun Lalu	Persentase Kenaikan/Penurunan Realisasi Tahun 2024 Vs Tahun -
				2023	2023
1	Peningkatan Kualifikasi Guru (D4/S1/S2)	%	100,00	100,00	0



Dalam sasaran ini indikator Peningkatan kualifikasi guru (D4/S1/S2) pada tahun 2024 realisasi sama dengan realisasi tahun 2023.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun Lalu	Persentase Kenaikan/Penurunan Realisasi Tahun 2024 Vs Tahun -
				2023	2023
1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	94,15	95,70	-1,55
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	84,86	66,51	18,35

Dalam sasaran ini indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI pada tahun 2024 realisasi menurun dibandingkan dengan realisasi tahun 2023. Persentase penurunan realisasi tersebut menurun sebesar 1,55 dibandingkan tahun 2023.

Dalam sasaran ini indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs pada tahun 2024 realisasi meningkat dibandingkan dengan realisasi tahun 2023. Persentase kenaikan realisasi tersebut meningkat sebesar 18,35 tahun dibandingkan tahun 2023.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun Lalu	Persentase Kenaikan/Penurunan Realisasi Tahun 2024 Vs Tahun -
				2023	2023
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	94,37	90,15	4,22
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	105,67	104,00	1,67
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	106,65	82,86	23,79

Dalam sasaran ini indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2024 realisasi meningkat 4,22% dibandingkan dengan realisasi tahun 2023. Realisasi tahun 2024 sebesar 94,37% dan realisasi tahun 2023 sebesar 90,15%.

Dalam sasaran ini indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A pada tahun 2024 realisasi meningkat 1,67% dibandingkan dengan realisasi tahun 2023. Realisasi tahun 2024 sebesar 105,67% dan realisasi tahun 2023 sebesar 104,00%.



Dalam sasaran ini indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B pada tahun 2024 realisasi meningkat 23,79% dibandingkan dengan realisasi tahun 2023. Realisasi tahun 2024 sebesar 106,65% dan realisasi tahun 2023 sebesar 82,86%.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun Lalu	Persentase Kenaikan/Penurunan Realisasi Tahun 2024 Vs Tahun -
				2023	2023
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12	%	99,88	99,83	0,05
2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15	%	99,03	70,05	28,98

Dalam sasaran ini indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 pada tahun 2024 realisasi meningkat 0,05% dibandingkan dengan realisasi tahun 2023. Realisasi tahun 2024 sebesar 99,88 % dan realisasi tahun 2023 sebesar 99,03%.

Dalam sasaran ini indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 pada tahun 2024 realisasi meningkat 28,98% dibandingkan dengan realisasi tahun 2023. Realisasi tahun 2024 sebesar 99,03% dan realisasi tahun 2023 sebesar 70,05%.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun Lalu	Persentase Kenaikan/Penurunan Realisasi Tahun 2024 Vs Tahun -
				2023	2023
1	Rasio Murid/Guru (SD/MI)		15,92	16,19	-0,27
2	Rasio Murid/Guru (SMP/MTs)		14,16	13,38	-0,78



Dalam sasaran ini indikator Rasio Murid/ Guru (SD/MI) pada tahun 2024 realisasi menurun dibandingkan dengan realisasi tahun 2023. Persentase realisasi tersebut menurun sebesar 0,27 dibandingkan tahun 2023.

Dalam sasaran ini indikator Rasio Murid/ Guru (SMP/MTs) pada tahun 2024 realisasi menurun dibandingkan dengan realisasi tahun 2023. Persentase realisasi tersebut menurun sebesar 0,78 dibandingkan tahun 2023.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun Lalu	Persentase Kenaikan/Penurunan Realisasi Tahun 2024 Vs Tahun -
				2023	2023
1	Angka Putus Sekolah (AptS) SD/MI	%	0,03	0,04	-0,01
2	Angka Putus Sekolah (AptS) SMP/MTs	%	0,11	0,11	0,00

Dalam sasaran ini indikator Angka Putus Sekolah untuk jenjang SD/MI pada tahun 2024 persentase realisasi menurun dengan tahun 2023 sebesar 0,01%.

Untuk indikator Angka Putus Sekolah untuk jenjang SMP/MTs pada tahun 2024 persentase realisasi sama dengan realisasi capaian tahun 2023.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun Lalu	Persentase Kenaikan/Penurunan Realisasi Tahun 2024 Vs Tahun -
				2023	2023
1	Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	%	88,80	80,05	8,75

Dalam sasaran ini indikator Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs pada tahun 2024 realisasi capaiannya meningkat sebesar 8,75% jika dibandingkan tahun 2023. Realisasi tahun 2024 sebesar 88,80% dan realisasi tahun 2023 sebesar 80,05%.



No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun Lalu	Persentase Kenaikan/Penurunan Realisasi Tahun 2024 Vs Tahun -
				2023	2023
1	Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SD	%	100,00	100,00	0
2	Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SMP	%	100,00	100,00	0

Dalam sasaran ini indikator Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SD pada tahun 2024 realisasi sama dengan realisasi tahun 2023.

Dalam sasaran ini indikator Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SMP pada tahun 2024 realisasi sama dengan realisasi tahun 2023.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun Lalu	Persentase Kenaikan/Penurunan Realisasi Tahun 2024 Vs Tahun -
				2023	2023
1	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SD/MI)		45,96	45,18	0,78
2	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SMP/MTs)		43,13	43,64	-0,51



3	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	%	98,25	76,77	21,48
4	Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	%	95,37	92,03	3,34

Dalam sasaran ini indikator Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SD/MI) pada tahun 2024 realisasi capaiannya meningkat sebesar 0,78% jika dibandingkan tahun 2023. Realisasi tahun 2024 sebesar 45,96% dan realisasi tahun 2023 sebesar 43,13%.

Dalam sasaran ini indikator Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SMP/MTs) pada tahun 2024 realisasi capaiannya menurun sebesar 0,51% jika dibandingkan tahun 2023. Realisasi tahun 2024 sebesar 43,13% dan realisasi tahun 2023 sebesar 43,64%.

Dalam sasaran ini indikator Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik pada tahun 2024 realisasi capaiannya meningkat sebesar 21,48% jika dibandingkan tahun 2023. Realisasi tahun 2024 sebesar 98,25% dan realisasi tahun 2023 sebesar 76,77%.

Dalam sasaran ini indikator Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik pada tahun 2024 realisasi capaiannya meningkat sebesar 3,34% jika dibandingkan tahun 2023. Realisasi tahun 2024 sebesar 95,37% dan realisasi tahun 2023 sebesar 92,03%.

3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target RPJMD Tahun -		Persentase Capaian Terhadap Target RPJMD Tahun -	
				2024	2026	2024	2026
1	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,02	13,20	13,30	98,64	97,90
2	Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,47	9,45	10,00	100,21	94,70



Dalam sasaran ini indikator Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun 2024 realisasi sebesar 13,02 tahun jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2024 diperoleh capaian sebesar 98,64%, dan jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2026 diperoleh persentase capaian sebesar 97,90%.

Dalam sasaran ini indikator Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada tahun 2024 realisasi sebesar 9,47 tahun jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2024 diperoleh capaian sebesar 100,21%, dan jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2026 diperoleh persentase capaian sebesar 94,70%.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target RPJMD Tahun -		Persentase Capaian Terhadap Target RPJMD Tahun -	
				2024	2026	2024	2026
1	Peningkatan Kualifikasi Guru (D4/S1/S2)	%	100,00	99,03	100,00	100,98	100,00

Dalam sasaran ini indikator Peningkatan kualifikasi guru (D4/S1/S2) pada tahun 2024 realisasi sebesar 100,00% jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2024 diperoleh capaian sebesar 100,98%, dan jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2026 diperoleh persentase capaian sebesar 100,00%.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target RPJMD Tahun -		Persentase Capaian Terhadap Target RPJMD Tahun -	
				2024	2026	2024	2026
1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	94,15	96,66	100,00	97,40	94,15
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	84,86	64,84	70,00	130,88	121,23

Dalam sasaran ini indikator Angka Partisipasi Murni untuk jenjang SD/MI pada tahun 2024 realisasi sebesar 94,15% jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2024 diperoleh capaian sebesar 97,40%, dan jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2026 diperoleh persentase capaian sebesar 94,15%.

Dalam sasaran ini indikator Angka Partisipasi Murni untuk jenjang SMP/MTs pada tahun 2024 realisasi sebesar 84,86% jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2024



memperoleh capaian sebesar 130,88%, dan jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2026 diperoleh persentase capaian sebesar 121,23%.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target RPJMD Tahun -		Persentase Capaian Terhadap Target RPJMD Tahun -	
				2024	2026	2024	2026
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	94,37	69,57	75,57	135,65	124,88
2.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	105,67	103,71	107,71	101,89	98,11
3.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket B	%	106,65	79,37	83,37	134,37	127,92

Dalam sasaran ini indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2024 realisasi sebesar 94,37% jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2024 memperoleh capaian sebesar 135,65 %, dan jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2026 diperoleh persentase capaian sebesar 124,88%.

Dalam sasaran ini indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A pada tahun 2024 realisasi sebesar 105,67% jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2024 memperoleh capaian sebesar 101,89%, dan jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2026 diperoleh persentase capaian sebesar 98,11%.

Dalam sasaran ini indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B pada tahun 2024 realisasi sebesar 106,65% jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2024 memperoleh capaian sebesar 134,37%, dan jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2026 diperoleh persentase capaian sebesar 127,92%.



No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target RPJMD Tahun -		Persentase Capaian Terhadap Target RPJMD Tahun -	
				2024	2026	2024	2026
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12	%	99,88	100,00	100,00	99,88	99,88
2.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15	%	99,03	100,00	100,00	99,03	99,03

Dalam sasaran ini indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 pada tahun 2024 realisasi sebesar 99,88% jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2024 memperoleh capaian sebesar 99,88%, dan jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2026 diperoleh persentase capaian sebesar 99,88%.

Dalam sasaran ini indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) (13-15) pada tahun 2024 realisasi sebesar 99,03% jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2024 memperoleh capaian sebesar 99,03%, dan jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2026 diperoleh persentase capaian sebesar 99,03%.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target RPJMD Tahun -		Persentase Capaian Terhadap Target RPJMD Tahun -	
				2024	2026	2024	2026
1	Rasio Murid/Guru (SD/MI)	%	15,92	20,00	20,00	79,60	79,60
2.	Rasio Murid/Guru (SMP/MTs)	%	14,16	20,00	20,00	70,80	70,80

Dalam sasaran ini indikator Rasio Murid/Guru (SD/MI) pada tahun 2024 realisasi sebesar 15,92% jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2024 memperoleh capaian sebesar 79,60%, dan jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2026 diperoleh persentase capaian sebesar 79,60%.

Dalam sasaran ini indikator Rasio Murid/Guru (SMP/MTs) pada tahun 2024 realisasi sebesar 11,48% jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2024 memperoleh capaian sebesar 70,80%, dan jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2026 diperoleh persentase capaian sebesar 70,80%.



No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target RPJMD Tahun -		Persentase Capaian Terhadap Target RPJMD Tahun -	
				2024	2026	2024	2026
1	APTs SD/MI	%	0,18	0,10	0,00	99,92	99,82
2	APTs SMP/MTs	%	0,28	0,10	0,00	99,98	99,72

Dalam sasaran ini indikator Angka Putus Sekolah untuk jenjang SD/MI pada tahun 2024 realisasi sebesar 0,18% jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2024 memperoleh capaian sebesar 99,92%, dan jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2026 diperoleh persentase capaian sebesar 99,82%.

Dalam sasaran ini indikator Angka Putus Sekolah untuk jenjang SMP/MTs pada tahun 2024 realisasi sebesar 0,28% jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2024 memperoleh capaian sebesar 99,98%, dan jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2026 diperoleh persentase capaian sebesar 99,72%.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target RPJMD Tahun -		Persentase Capaian Terhadap Target RPJMD Tahun -	
				2024	2026	2024	2026
1	Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	%	88,80	83,46	87.46	106,40	101,53

Dalam sasaran ini indikator Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs pada tahun 2024 realisasi sebesar 88,80% jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2024 diperoleh capaian sebesar 106,40%, dan jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2026 diperoleh persentase capaian sebesar 101,53%. Nilai ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur khususnya Dinas Pendidikan harus terus berupaya untuk mencapai target pada tahun 2026 dan harus mempertahankan pencapaian tersebut dengan realisasi yang konstan atau meningkat untuk tahun mendatang.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target RPJMD Tahun -		Persentase Capaian Terhadap Target RPJMD Tahun -	
				2024	2026	2024	2026
1	Persentase Sekolah yang	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



	Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SD						
2	Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SMP	%	100,00	95,40	100,00	104,82	100,00

Dalam sasaran ini indikator Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SD pada tahun 2024 realisasi sebesar 100,00% jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2024 memperoleh capaian sebesar 100,00%, dan jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2026 diperoleh persentase capaian sebesar 100,00 %.

Dalam sasaran ini indikator Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SMP pada tahun 2024 realisasi sebesar 100,00% jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2024 memperoleh capaian sebesar 104,82%, dan jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2026 diperoleh persentase capaian sebesar 100,00%.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target RPJMD Tahun -		Persentase Capaian Terhadap Target RPJMD Tahun -	
				2024	2026	2024	2026
1	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SD/MI)	%	45,96	56,68	56,88	81,09	80,80
2	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SMP/MTs)	%	43,13	53,36	53,56	80,83	80,53

Dalam sasaran ini indikator Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah (SD/MI) pada tahun 2024 realisasi sebesar 45,96% jika dibandingkan dengan target RPJMD



tahun 2024 memperoleh capaian sebesar 81,09%, dan jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2026 diperoleh persentase capaian sebesar 80,80%.

Dalam sasaran ini indikator Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah (SMP/MTs) pada tahun 2024 realisasi sebesar 43,13% jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2024 memperoleh capaian sebesar 80,83%, dan jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2026 diperoleh persentase capaian sebesar 80,53%.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target RPJMD Tahun -		Persentase Capaian Terhadap Target RPJMD Tahun -	
				2024	2026	2024	2026
1	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	%	98,25	61,45	67,45	159,89	145,66
2	Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	%	95,03	60,99	66,99	155,81	141,86

Dalam sasaran ini indikator Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik pada tahun 2024 realisasi sebesar 98,25% jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2024 memperoleh capaian sebesar 159,89%, dan jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2026 diperoleh persentase capaian sebesar 145,66 %.

Dalam sasaran ini indikator Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik pada tahun 2024 realisasi sebesar 95,03% jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2024 memperoleh capaian sebesar 155,81%, dan jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2026 diperoleh persentase capaian sebesar 141,86%.

4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Angka Partisipasi	Tahun	99,88	99,34	100,54



	Sekolah (APS) 7-12 Tahun				
2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun	Tahun	99,03	96,55	102,57

Indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun 2024 persentase capaian sebesar 100,54% dan realisasi tahun 2024 sebesar 99,88%, nilai ini sudah melebihi Standar nasional yaitu sebesar 99,34%.

Indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun 2024 persentase capaian sebesar 102,57% dan realisasi tahun 2024 sebesar 99,03%, nilai ini sudah melebihi Standar nasional yaitu sebesar 96,55%.

5) Analisis Capaian Kinerja

Capaian kinerja Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 2024 sebesar 13,02 tahun. Hal ini berarti penduduk di Kabupaten Kutai Timur yang berusia 7 tahun memiliki harapan untuk bersekolah hingga Diploma I. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) ini meningkat 0,01 tahun jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 13,01 tahun.

Capaian kinerja Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tahun 2024 sebesar 9,47 tahun. Hal ini berarti penduduk di Kabupaten Kutai Timur yang berusia 25 tahun keatas rata-rata telah menempuh Pendidikan hingga kelas X atau kelas 1 SMA semester 1. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) ini meningkat 0,02 tahun jika dibandingkan dengan RLS tahun 2023 sebesar 9,45 tahun.

Untuk meningkatkan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) ini sangat dibutuhkan sosialisasi pendidikan mengenai pentingnya wajib belajar minimal 12 tahun kepada penduduk di Kabupaten Kutai Timur. Diharapkan dari kegiatan sosialisasi Pendidikan ini dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya wajib belajar minimal 12 tahun. Selain itu dari segi infrastruktur peningkatan sarana prasarana Pendidikan juga sangat berpengaruh terhadap meningkatnya angka HLS dan RLS karena sarana dan prasarana pendidikan yang baik akan membuat warga sekolah seperti pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik merasa lebih nyaman, lebih aman dan lebih bersemangat dalam mengenyam Pendidikan. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah kualitas pendidik yang lebih inovatif, kreatif dan professional sehingga membuat peserta didik lebih semangat dalam memperoleh pelajaran dan dapat menciptakan peserta didik yang unggul, berkualitas serta mampu bersaing secara nasional maupun international.

Nilai Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI dihitung berdasarkan data siswa SD usia 7-12 tahun di bandingkan dengan data penduduk usia 7-12 tahun, sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) berdasarkan data siswa keseluruhan SD/MI dibandingkan dengan data penduduk usia 7-12 tahun. Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI tahun 2024 sebesar 94,15%, nilai ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 95,70%. Nilai APK tahun 2024 sebesar 105,67%, nilai ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 104,00%. Untuk Angka Partisipasi Sekolah usia 7-12 tahun jenjang Pendidikan dasar tahun 2024 sebesar 99,88% nilai ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 99,83%. Dari data diatas dapat diketahui bahwa siswa SD yang bersekolah usia 7-12 tahun hanya sekitar 99,88% dari total penduduk usia 7-12 tahun.

Nilai Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs dihitung berdasarkan data siswa SMP/MTs usia 13-15 tahun di bandingkan dengan data penduduk usia 13-15 tahun, sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) berdasarkan data siswa keseluruhan SMP dibandingkan dengan data penduduk usia 13-15 tahun. Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS tahun 2024 sebesar 84,86%, nilai ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 66,51%. Nilai APK tahun 2024 sebesar 106,65%, nilai ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 82,86%. Untuk Angka Partisipasi Sekolah usia 13-15 tahun jenjang Pendidikan SMP tahun 2024 sebesar 99,03% nilai ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 70,05%.

Maka solusinya adalah pihak yang berwenang mengurus masalah ini (Sekolah dan Dinas Pendidikan) harus lebih selektif dalam memilih siswa baru agar dapat sesuai dengan standar usia sekolah perjenjang pendidikan yang telah ditetapkan. Sehingga dampak-dampak buruk yang ditimbulkan dikemudian hari dapat di minimalisir, seperti kejenuhan belajar untuk murid tingkat Pendidikan Dasar.

Persentase guru SD yang telah memenuhi kualifikasi minimal S1 tahun 2024 sebesar 100,00%, nilai ini sama dengan tahun 2023.

Permasalahan yang dihadapi yaitu masih banyaknya fasilitas Pendidikan yang belum memadai di berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur, mulai dari Bangunan gedung yang kurang layak sampai sarana penunjang pendidikan yang masih minim. Maka diharapkan kepada Pemerintah Daerah untuk bisa lebih fokus terhadap pendanaan pendidikan khususnya pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sarana prasarana Pendidikan yang ada di 18 Kecamatan Kabupaten Kutai Timur.



6) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	103.06	77.87	1.32

Adapun sasaran meningkatnya taraf pendidikan masyarakat dengan capaian 103.06% dan penyerapan anggaran 77.87% menghasilkan tingkat efisiensi yang sangat baik sebesar 1.32 .

7) Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Pernyataan Kinerja

Untuk sasaran Tercapainya peningkatan taraf Pendidikan masyarakat program yang menunjang berdasarkan Kepmendagri 050 adalah program pengelolaan Pendidikan dengan berbagai kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan :

- 1. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 2. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- 3. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
- 4. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- 5. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

2) Analisis Capaian Kinerja

TABEL 3.4
RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH PER PENDUDUK USIA SEKOLAH
TAHUN 2023 DAN 2024

NO	Jenjang Pendidikan	Tahun	
		2023	2024
1	SD/MI		
	Jumlah SD	233	238
	Jumlah MI	10	10
	Jumlah SD/MI	243	248
	Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun (BPS)	-	
	Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun (Capil)	53.784	53.965



	Rasio Per 10.000 (BPS)		
	Rasio Per 10.000 (Capil)	45,18	45,96
	Rasio Ideal per 10.000	52,00	52,00
2	SMP/MTS		
	Jumlah SMP	92	95
	Jumlah MTS	17	17
	Jumlah SMP/MTS	109	112
	Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun (BPS)	-	
	Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun (Capil)	24.977	25.969
	Rasio Per 10.000 (BPS)		
	Rasio Per 10.000 (Capil)	43,64	43,13
	Rasio Ideal per 10.000	52,00	52,00

Rasio Ketersediaan Sekolah SD/MI jika dibandingkan dengan penduduk usia sekolah dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Capil) tahun 2024 sebesar 45,96 per 10.000 penduduk, nilai ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 45,18 per 10.000 penduduk. Nilai ini belum termasuk dalam rasio ideal per 10.000 penduduk yaitu 52,00.

Rasio Ketersediaan Sekolah SMP/MTS jika dibandingkan dengan penduduk usia sekolah dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Capil) tahun 2024 sebesar 43,13 per 10.000 penduduk, nilai ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 46,64 per 10.000 penduduk. Nilai ini belum termasuk dalam rasio ideal per 10.000 penduduk yaitu 52,00.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Sekolah di Kabupaten Kutai Timur untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTS masih dibawah jumlah ideal untuk menampung penduduk yang ada di Kabupaten Kutai Timur.

3) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan	80.96	77.87	1.03



Adapun sasaran Tercapainya Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dengan capaian 80.96% dan penyerapan anggaran 77.87% maka mempunyai tingkat efisiensi sebesar 1.03. Anggaran untuk meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan bersumber dari Dana APBD dan APBN (DAK Fisik Reguler).

4) Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Pernyataan Kinerja

Untuk sasaran meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan, capaian ini merupakan kinerja dari Program Pengelolaan Pendidikan dengan kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama .

Dengan Sub Kegiatan :

1. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
2. Penambahan Ruang Kelas Baru
3. Pembangunan Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU
4. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
5. Pembangunan Perpustakaan Sekolah
6. Pembangunan Laboratorium
7. Pembangunan Ruang Serba Guna/ Aula
8. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
9. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
10. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
11. Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru / Kepala Sekolah/ TU
12. Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
13. Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan Sekolah
14. Rehabilitasi Sedang/ Berat Laboratorium
15. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
16. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru Penjaga Sekolah
17. Pengadaan Mebel Sekolah
18. Pengadaan Perlengkapan Sekolah
19. Pengadaan Perlengkapan Siswa
20. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik
21. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
22. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
23. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
24. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan
25. Pengelolaan Dana BOS
26. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS

3.3 TABEL RINCIAN PENCAPAIAN KINERJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2024



TABEL 3.5
GURU YANG MEMENUHI KUALIFIKASI D-IV/S1 JENJANG SD/MI
TAHUN AJARAN 2024/2025

No	Kecamatan	Jumlah Guru	
		Guru Pendidikan ≥S1	Jumlah Guru Keseluruhan
1	Muara Ancalong	156	156
2	Busang	63	63
3	Long Mesangat	72	72
4	Muara Wahau	284	284
5	Telen	100	100
6	Kongbeng	227	227
7	Muara bengkal	120	120
8	Batu Ampar	72	72
9	Sangatta Utara	893	893
10	Bengalon	371	371
11	Teluk Pandan	118	118
12	Sangatta Selatan	216	216
13	Rantau Pulung	106	106
14	Sangkulirang	221	221
15	Kaliorang	128	128
16	Sandaran	137	137
17	Kaubun	149	149
18	Karangan	120	120
Kabupaten Kutai Timur		3.553	3.553

TABEL 3.6
GURU YANG MEMENUHI KUALIFIKASI D-IV/S1 JENJANG SMP/MTs
TAHUN AJARAN 2024/2025

No	Kecamatan	Jumlah Guru	
		Guru Pendidikan ≥S1	Jumlah Guru Keseluruhan
1	Muara Ancalong	65	65
2	Busang	20	20
3	Long Mesangat	34	34



4	Muara Wahau	131	131
5	Telen	41	41
6	Kongbeng	95	95
7	Muara bengkal	57	57
8	Batu Ampar	20	20
9	Sangatta Utara	390	390
10	Bengalon	119	119
11	Teluk Pandan	66	66
12	Sangatta Selatan	100	100
13	Rantau Pulung	40	40
14	Sangkulirang	82	82
15	Kaliorang	53	53
16	Sandaran	55	55
17	Kaubun	70	70
18	Karangan	36	36
Kabupaten Kutai Timur		1.474	1.474

TABEL 3.7
JUMLAH SISWA PUTUS SEKOLAH DASAR (SD) PER KECAMATAN
TAHUN AJARAN 2024/2025

No	Kecamatan	Jumlah Sekolah	
		Jumlah Siswa Putus Sekolah	Jumlah Murid
1	Muara Ancalong	1	1.845
2	Busang	1	790
3	Long Mesangat	1	905
4	Muara Wahau	3	4.798
5	Telen	1	1.765
6	Kongbeng	2	3.953
7	Muara bengkal	1	1.770
8	Batu Ampar	0	876
9	Sangatta Utara	0	14.927
10	Bengalon	1	5.939
11	Teluk Pandan	2	1.595



12	Sangatta Selatan	0	3.257
13	Rantau Pulung	0	1.696
14	Sangkulirang	0	3.479
15	Kaliorang	1	2.284
16	Sandaran	0	2.167
17	Kaubun	2	2.476
18	Karangan	2	2.027
Kabupaten Kutai Timur		18	56.549

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur

TABEL 3.8
JUMLAH SISWA PUTUS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) PER KECAMATAN
TAHUN AJARAN 2024/2025

No	Kecamatan	Jumlah Sekolah	
		Jumlah Siswa Putus Sekolah	Jumlah Murid
1	Muara Ancalong	0	859
2	Busang	0	243
3	Long Mesangat	0	375
4	Muara Wahau	2	1.694
5	Telen	3	484
6	Kongbeng	1	1.591
7	Muara bengkal	0	662
8	Batu Ampar	0	224
9	Sangatta Utara	3	6.179
10	Bengalon	2	1.646
11	Teluk Pandan	3	785
12	Sangatta Selatan	0	1.469
13	Rantau Pulung	0	291
14	Sangkulirang	2	1.116
15	Kaliorang	2	733
16	Sandaran	1	714
17	Kaubun	3	887
18	Karangan	0	625
Kabupaten Kutai Timur		22	20.877

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur



TABEL 3.9
ANGKA KELULUSAN SD/MI PER KECAMATAN TAHUN AJARAN 2024/2025

No	Kecamatan	Jumlah Sekolah	
		Jumlah Peserta	Jumlah Siswa Lulus
1	Muara Ancalong	327	327
2	Busang	86	86
3	Long Mesangat	130	130
4	Muara Wahau	628	628
5	Telen	257	257
6	Kongbeng	572	572
7	Muara bengkal	291	291
8	Batu Ampar	128	128
9	Sangatta Utara	2,490	2,490
10	Bengalon	327	327
11	Teluk Pandan	828	828
12	Sangatta Selatan	252	252
13	Rantau Pulung	514	514
14	Sangkulirang	244	244
15	Kaliorang	545	545
16	Sandaran	364	364
17	Kaubun	325	325
18	Karangan	363	363
Kabupaten Kutai Timur		8.601	8.601

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur

TABEL 3.10
ANGKA KELULUSAN SMP/MTs PER KECAMATAN TAHUN AJARAN 2024/2025

No	Kecamatan	Jumlah Sekolah	
		Jumlah Peserta	Jumlah Siswa Lulus
1	Muara Ancalong	237	237
2	Busang	100	100
3	Long Mesangat	123	123
4	Muara Wahau	357	357
5	Telen	140	140



6	Kongbeng	436	436
7	Muara bengkal	264	264
8	Batu Ampar	99	99
9	Sangatta Utara	1648	1648
10	Bengalon	472	472
11	Teluk Pandan	180	180
12	Sangatta Selatan	282	282
13	Rantau Pulung	197	197
14	Sangkulirang	383	383
15	Kaliorang	195	195
16	Sandaran	184	184
17	Kaubun	245	245
18	Karangan	154	154
Kabupaten Kutai Timur		6.103	6.103

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur

TABEL 3.11
SEKOLAH PENDIDIKAN KONDISI BANGUNAN BAIK
TAHUN AJARAN 2024/2025

NO	Jenjang Pendidikan	Tahun
		2024
1	Jumlah Kelas Baik	
1.1	SD/MI	2.801
	SMP/MTS	865
	Jumlah Seluruh Kelas	
	SD/MI	2.851
	SMP/MTS	907
	Persentase Sekolah Kondisi Bangunan Baik	
	SD/MI	98,25
	SMP/MTS	95,37

TABEL 3.12
RASIO GURU DAN MURID PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2024

NO	Jenjang Pendidikan	Tahun
		2024
1	JUMLAH SISWA SD/MI	
1.1	SD	54.241
1.2	MI	2.308
1.3	Jumlah Siswa SD/MI	56.549



2	JUMLAH GURU SD/MI	
2.1	SD	3.388
2.2	MI	165
2.3	Jumlah Guru SD/MI	3.553
	Rasio Siswa/Guru SD	15,92
3	JUMLAH SISWA SMP/MTS	
3.1	SMP	18.626
3.2	MTS	2.251
3.3	Jumlah Siswa SMP/MTS	20.877
4	JUMLAH GURU SMP/MTS	
4.1	SMP	1.269
4.2	MTS	205
4.3	Jumlah Guru SMP/MTS	1.474
	Rasio Siswa/Guru SMP	14,16

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur Tahun Ajaran 2024/2025

TABEL 3.13
ANGKA PARTISIPASI MURNI TAHUN AJARAN 2024/2025

PENDUDUK MENURUT USIA (DATA CAPIL)		JUMLAH SISWA		APM	
7-12 Tahun	13-15 Tahun	7-12 Tahun	13-15 Tahun	7-12 Tahun	13-15 Tahun
53.965	25.969	50.806	22.038	94,15	84,86

TABEL 3.14
ANGKA PARTISIPASI KASAR TAHUN AJARAN 2024/2025

PENDUDUK MENURUT USIA (DATA CAPIL)		JUMLAH SISWA		APK	
7-12 Tahun	13-15 Tahun	Jumlah Keseluruhan SD/MI/Paket A	Jumlah Keseluruhan SD/MI/Paket B	SD/MI	SMP/MTs
53.965	25.969	57.027	27.697	105,67	106,65

3.3 REALISASI ANGGARAN

Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 adalah sebesar Rp. **3.276.182.875.947,-** (Tiga Triliyun Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Seratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp. **2.851.449.555.702,87,-** (Dua Triliyun Delapan Ratus Lima Puluh Satu Milyar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua, Delapan Puluh Tujuh Rupiah) atau sebesar **87,04%**. Dengan rincian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dan Non ASN Rp. **849.644.784.968,-** (Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan



Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. **787.253.076.648,-** (Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) dengan nilai pencapaian sebesar **92,66%**, dan Belanja BOS Reguler, Afirmasi dan Kinerja SD, SMP, PAUD dan Kesetaraan sebesar Rp. **92.846.552.374,77,-** (Sembilan Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat, Tujuh Puluh Tujuh Rupiah), untuk dana BOS ini langsung disalurkan pusat ke Sekolah-sekolah di Kabupaten Kutai Timur sebagai Bantuan Operasional Sekolah, adapun sisa dana pada anggaran BOS tidak masuk ke dalam Kas daerah melainkan tetap pada kas sekolah untuk dibelanjakan pada tahun selanjutnya. Untuk belanja Dana DAK fisik reguler Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp. **39.909.422.000,-** (Tiga Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. **37.722.375.329,-** (Tiga Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) dengan nilai pencapaian sebesar **94,52%**. Adapun rincian dari realisasi keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut



TABEL 3.15
ANGGARAN PERSASARAN

KODE REKENING	PROGRAM KEGIATAN		PAGU	REALISASI		SISA DANA
			(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
	TOTAL		3.276.146.575.947,00	2.851.449.555.702,87	87,04	424.697.020.244,13
1:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1.026.806.124.968,00	954.206.076.052,00	92,93	72.600.048.916,00
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		9.142.039.546,00	8.699.247.826,00	95,16	442.791.720,00
1.01.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.171.770.884,00	4.068.569.860,00	97,53	103.201.024,00
1.01.01.2.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	137.038.098,00	92.884.491,00	67,78	44.153.607,00
1.01.01.2.01.03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	72.510.000,00	17.272.700,00	23,82	55.237.300,00
1.01.01.2.01.04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	50.000.000,00	26.326.700,00	52,65	23.673.300,00
1.01.01.2.01.05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	76.718.565,00	66.323.700,00	86,45	10.394.865,00
1.01.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.537.810.907,00	1.468.339.350,00	95,48	69.471.557,00
1.01.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.096.191.092,00	2.959.531.025,00	95,59	136.660.067,00
01.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		857.009.784.968,00	793.464.175.078,00	92,59	63.545.609.890,00



01.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	739.264.243.898,00	687.687.567.728,00	93,02	51.576.676.170,00
01.01.01.2.02.02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	110.380.541.070,00	99.565.508.920,00	90,20	10.815.032.150,00
01.01.01.2.02.03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.466.741.510,00	2.087.224.520,00	84,61	379.516.990,00
01.01.01.2.02.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.580.258.490,00	1.428.587.952,00	90,40	151.670.538,00
01.01.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.951.587.000,00	1.746.897.368,00	89,51	204.689.632,00
01.01.01.2.02.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	1.366.413.000,00	948.388.590,00	69,41	418.024.410,00
1.01.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	716404764,00	670463240,00	93,59	45.941.524,00
1.01.01.2.03.02		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	230.739.180,00	227.586.600,00	98,63	3.152.580,00
1.01.01.2.03.06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	485.665.584,00	442.876.640,00	84,11	42.788.944,00
1.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	53.351.443.750,00	51.135.681.600,00	95,85	2.215.762.150,00
1.01.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	44.160.144.000,00	42.544.062.500,00	91,19	1.616.081.500,00
1.01.01.2.05.03		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.096.520.000,00	1.676.307.600,00	79,96	420.212.400,00



1.01.01.2.05.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	7.094.779.750,00	6.915.311.500,00	97,47	179.468.250,00
1.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	50.504.241.360,00	48.027.513.423,00	95,10	2.476.727.937,00
1.01.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.194.957.700,00	6.015.790.300,00	97,11	179.167.400,00
1.01.01.2.06.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	834.675.750,00	434.010.520,00	52,00	400.665.230,00
1.01.01.2.06.08		Fasilitas Kunjungan Tamu	1.183.910.500,00	1.091.739.500,00	92,21	92.171.000,00
1.01.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.956.908.000,00	1.773.050.503,00	90,60	183.857.497,00
1.01.01.2.06.10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13.452.101.520,00	12.962.699.600,00	96,36	489.401.920,00
1.01.01.2.06.11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	26.881.687.890,00	25.750.223.000,00	95,79	1.131.464.890,00
1.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49.149.635.380,00	45.881.795.400,00	93,35	3.267.839.980,00
1.01.01.2.07.0001		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.802.832.480,00	25.511.800.000,00	98,87	291.032.480,00
1.01.01.2.07.0009		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.104.708.000,00	1.049.723.085,00	95,02	54.984.915,00
1.01.01.2.07.0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.242.094.900,00	19.320.272.315,00	86,86	2.921.822.585,00
1.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	500.000.000,00	310.556.039,00	62,11	189.443.961,00



1.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	500.000.000,00	310.556.039,00	62,11	189.443.961.00
1.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.432.575.200,00	6.016.643.446,00	93,53	415.931.754.00
1.01.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	664.000.000,00	298.229.396,00	44,91	365.770.604.00
1.01.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	300.000.000,00	258.987.000,00	86,33	41.013.000.00
1.01.01.2.09.11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.468.575.200,00	5.459.427.050,00	99,83	9.148.150.00
1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	2.160.511.039.825,00	1.811.264.502.901,87	83,84	349.246.536.923.13
1.01.02.2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.252.512.421.922,58	1.164.489.439.250,87	92,97	88.022.982.671.71
1.01.02.2.01.01		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	3.500.000.000,00	1.510.130.600,00	43,15	1.989.869.400,00
1.01.02.2.01.03		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	30.561.313.700,00	27.902.825.900,00	91,30	2.658.487.800,00
1.01.02.2.01.04		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	8.724.000.000,00	5.645.793.500,00	64,72	3.078.206.500,00
1.01.02.2.01.05		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	6.985.296.465,00	6.207.849.100,00	88,78	777.447.365,00
1.01.02.2.01.06		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	149.788.119.272,00	122.746.639.363,34	81,95	27.041.479.908,66
1.01.02.2.01.07		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	27.875.939.200,00	22.362.495.100,00	80,22	5.513.444.100,00
1.01.02.2.01.08		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU	8.941.776.192,00	4.847.609.288,00	54,21	4.094.166.904,00
1.01.02.2.01.11		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.109.468.268,00	1.078.655.099,00	97,22	30.813.169,00



1.01.02.2.01.11		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1.529.661.100 ,00	1251225246,00	81,80	278.435.854,00
1.01.02.2.01.13		Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	5.988.439.000,00	4.857.475.700,00	81,11	1.130.963.300,00
1.01.02.2.01.14		Pengadaan Mebel Sekolah	82.790.589.150,00	82.423.617.900,00	99,56	366.971.250,00
1.01.02.2.01.16		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	152.777.950.049,58	151.570.871.200,00	99,21	1.207.078.849,58
1.01.02.2.01.17		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.925.000.000,00	2.442.251.600,00	83,50	482.748.400,00
1.01.02.2.01.21		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	23.850.000.000,00	23.632.537.470,00	99,09	217.462.530,00
1.01.02.2.01.22		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	500.000.000,00	499.975.000,00	100,00	25.000,00
1.01.02.2.01.25		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	9.000.000.000,00	8.752.146.050,00	97,25	247.853.950,00
1.01.02.2.01.27		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	3.000.000.000,00	2.896.315.000,00	96,54	103.685.000,00
1.01.02.2.01.28		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	5.709.000.000,00	5.579.326.120,00	97,73	129.673.880,00
1.01.02.2.01.29		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	57.614.070.000,00	57.549.647.313,77	99,89	64.422.686,23
1.01.02.2.01.30		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1.000.000.000,00	975.977.700,00	97,60	24.022.300,00
1.01.02.2.01.31		Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	20.767.174.626,00	19.675.072.926,00	94,74	1.092.101.700,00
1.01.02.2.01.33		Pemeliharaan Mebel Sekolah	700.000.000,00	666.508.000,00	95,22	33.492.000,00
1.01.02.2.01.35		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	17.852.000.000,00	17.852.000.000,00	98,90	196.008.000,00
1.01.02.2.01.36		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	500.000.000,00	346.297.800,00	69,26	153.702.200,00
1.01.02.2.01.37		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	1.000.000.000,00	876.744.500,00	87,67	123.255.500,00



1.01.02.2.01.38		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	6.108.890.160,00	5.829.561.000,00	95,43	279.329.160,00
1.01.02.2.01.39		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1.100.000.000,00	1.026.751.215,00	93,34	73.248.785,00
1.01.02.2.01.41		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4.500.000.000,00	3.211.937.000,00	71,38	1.288.063.000,00
1.01.02.2.01.43		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	500.000.000,00	454.440.000,00	90,89	45.560.000,00
1.01.02.2.01.45		Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	83.783.975.500,00	83.175.236.560,00	99,27	608.738.940,00
1.01.02.2.01.46		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	174.566.305.420,00	173.750.304.200,00	99,53	816.001.220,00
1.01.02.2.01.47		Pembangunan Ruang Kelas Baru	270.667.458.500,00	246.947.833.172,00	91,24	23.719.625.328,00
1.01.02.2.01.48		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.388.341.600,00	4.324.993.200,00	98,56	63.348.400,00
1.01.02.2.01.49		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	12.000.000.000,00	10.913.140.000,00	90,94	1.086.860.000,00
1.01.02.2.01.50		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	1.500.000.000,00	1.475.331.850,00	98,36	24.668.150,00
1.01.02.2.01.51		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	68.407.653.720,00	59.425.931.577,76	86,87	8.981.722.142,24
1.01.02.2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	569.116.801.793,00	407.308.550.250,00	71,57	161.808.251.543,00
1.01.02.2.02.03		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	25.676.096.380,00	15.875.670.712,00	61,83	9.800.425.668,00
1.01.02.2.02.04		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	3.109.305.000,00	1.919.900.000,00	61,75	1.189.405.000,00
1.01.02.2.02.05		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	12.441.904.000,00	8.983.790.217,00	72,21	3.458.113.783,00
1.01.02.2.02.06		Pembangunan Laboratorium	35.428.136.475,00	, 27.849.934.237,00	78,61	7.578.202.238,00
1.01.02.2.02.07		Pembangunan Ruang Serba Guna/ Aula	194.490.000,00	193.229.000,00	40,30	5.742.725.717,00



1.01.02.2.02.09		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah	12.074.800.000,00	10.883.579.395,00	90,13	1.191.220.605,00
1.01.02.2.02.11		Pembangunan Kantin Sekolah	194.490.000,00	193.229.000,00	99,35	1.261.000,00
1.01.02.2.02.12		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	85.390.653.335,00	41.143.218.092,00	48,18	44.247.435.243,00
1.01.02.2.02.14		Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah	4.602.120.000,00	3.904.343.693,00	84,84	697.776.307,00
1.01.02.2.02.17		Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan Sekolah	250.000.000,00	240.548.000,00	96,22	9.452.000,00
1.01.02.2.02.18		Rehabilitasi Sedang/ Berat Laboratorium	470.000.000,00	452.059.657,00	96,18	17.940.343,00
1.01.02.2.02.21		Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah	765.920.000,00	574.954.000,00	75,07	190.966.000,00
1.01.02.2.02.24		Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.016.871.440,00	583.940.000,00	57,43	432.931.440,00
1.01.02.2.02.25		Pengadaan Mebel Sekolah	36.934.125.000,00	34.424.197.615,00	93,20	2.509.927.385,00
1.01.02.2.02.27		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	34.834.739.700,00	29.689.535.000,00	85,23	5.145.204.700,00
1.01.02.2.02.32		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	8.347.350.960,00	8.316.250.340,00	99,63	31.100.620,00
1.01.02.2.02.34		Perlengkapan Belajar Peserta Didik	3.498.734.000,00	3.493.013.500,00	99,84	5.720.500,00
1.01.02.2.02.35		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	59.743.708.000,00	41.071.750.300,00	68,75	18.671.957.700,00
1.01.02.2.02.38		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	17.912.929.200,00	14.795.675.131,00	82,60	3.117.254.069,00
1.01.02.2.02.40		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.750.000.000,00	1.721.522.800,00	98,37	28.477.200,00
1.01.02.2.02.41		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	3691000000	3614748000	97,93	76.252.000,00



1.01.02.2.02.42		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	24.029.844.418,00	23.932.626.640,00	99,60	97.217.778,00
1.01.02.2.02.43		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1.342.121.725,00	1.342.121.725,00	100,00	-
1.01.02.2.02.48		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	2.996.580.000,00	2.990.025.000,00	99,78	9.839.300,00
1.01.02.2.02.49		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	1.100.000.000,00	1.090.160.700,00	99,11	6.555.000,00
1.01.02.2.02.50		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	400.000.000,00	357.662.272,00	89,42	42.337.728,00
1.01.02.2.02.51		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	371.019.000,00	301.712.340,00	81,32	69.306.660,00
1.01.02.2.02.52		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	3.245.564.289,00	3.057.034.900,00	94,19	188.529.389,00
1.01.02.2.02.54		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.300.000.000,00	2.899.162.100,00	87,85	400.837.900,00
1.01.02.2.02.55		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1.300.000.000,00	1.235.079.500,00	95,01	64.920.500,00
1.01.02.2.02.58		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	200.000.000,00	172.202.828,00	86,10	27.797.172,00
1.01.02.2.02.59		Pembangunan Ruang Kelas Baru	72.432.088.735,00	36.857.786.198,00	50,89	35.574.302.537,00
1.01.02.2.02.60		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	3.052.861.436,00	3.011.491.175,00	98,64	41.370.261,00
1.01.02.2.02.61		Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	43.842.367.000,00	38.758.118.100,00	88,40	5.084.248.900,00
1.01.02.2.02.62		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	53.560.573.700,00	37.503.671.800,00	70,02	16.056.901.900,00
1.01.02.2.02.64		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	190.938.000,00	190.601.000,00	99,82	337.000,00
1.01.02.2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	285.884.441.109,42	223.420.522.358,00	78,15	62.463.918.751,42
1.01.02.2.03.02		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	25.515.348.008,74	12.472.331.000,00	54,36	13.043.017.008,74



1.01.02.2.03.03		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	3.954.418.000,00	3.199.899.184,00	92,46	754.518.816,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.873.151.000,00	673.507.300,00	98,47	1.199.643.700,00
1.01.02.2.03.07		Pengadaan Mebel PAUD	30.850.000.000,00	29.415.151.000,00	89,45	1.434.849.000,00
1.01.02.2.03.10		Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	75.545.000.000,00	60.070.090.924,00	100,00	15.474.909.076,00
1.01.02.2.03.11		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.329.000.000,00	999.083.530,00	85,97	329.916.470,00
1.01.02.2.03.12		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	43.095.000.000,68	23.427.550.842,00	14,51	19.667.449.158,68
1.01.02.2.03.13		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	1.300.000.000,00	1.201.916.077,00	97,67	98.083.923,00
1.01.02.2.03.16		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	1.750.000.000,00	1.723.150.000,00	76,62	26.850.000,00
1.01.02.2.03.17		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	5.470.200.000,00	4.892.919.733,00	73,27	577.280.267,00
1.01.02.2.03.18		Pengelolaan Dana BOP PAUD	9.373.600.000,00	8.674.733.421,00	92,54	698.866.579,00
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	500.000.000,00	429.862.500,00	87,65	70.137.500,00
1.01.02.2.03.25		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	300.000.000,00	43.517.000,00	97,07	256.483.000,00
1.01.02.2.03.26		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	300.000.000,00	293.005.000,00	99,48	6.995.000,00
1.01.02.2.03.28		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.178.472.100,00	1.669.073.700,00	54,36	509.398.400,00
1.01.02.2.03.30		Pembangunan Ruang Kelas Baru	28.663.252.000,00	21.000.821.100,00	92,46	7.662.430.900,00
1.01.02.2.03.34		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	3.337.000.000,00	3.299.930.000,00	98,47	37.070.000,00
1.01.02.2.03.39		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	2.200.000.000,00	1.928.355.649,00	89,45	271.644.351,00



1.01.02.2.03.40		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	3.900.000.000,00	3.785.895.000,00	100,00	114.105.000,00
1.01.02.2.03.41		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	44.450.000.000,00	44.219.729.398,00	85,97	230.270.602,00
1.01.02.2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	52.997.375.000,00	16.045.991.043,00	30,28	36.951.383.957,00
1.01.02.2.04.01		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	29.939.082.000,00	4.418.652.900,00	14,76	25.520.429.100,00
1.01.02.2.04.10		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	1.450.800.000,00	1.357.940.145,00	93,60	92.859.855,00
1.01.02.2.04.11		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	1.000.000.000,00	856.266.000,00	85,63	143.734.000,00
1.01.02.2.04.14		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	-
1.01.02.2.04.15		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	-
1.01.02.2.04.16		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	3.350.000.000,00	3.147.422.730,00	93,95	202.577.270,00
1.01.02.2.04.17		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2.844.510.000,00	2.689.545.000,00	94,55	154.965.000,00
1.01.02.2.04.18		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	300.000.000,00	248.927.100,00	82,98	51.072.900,00
1.01.02.2.04.27		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	150.000.000,00	81.165.000,00	54,11	68.835.000,00
1.01.02.2.04.36		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	11.600.000.000,00	1.581.859.568,00	13,64	10.018.140.432,00
1.01.02.2.04.40		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00
1.01.02.2.04.46		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	600.000.000,00	537.849.400,00	89,64	62.150.600,00
1.01.02.2.04.47		Pembangunan Ruang Laboratorium	208.000.000,00	193.583.000,00	93,07	14.417.000,00



1.01.02.2.04.48		Pengadaan Mebel Sekolah	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00
1.01.02.2.04.50		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	704.983.000,00	682.780.200,00	96,85	22.202.800,00
1.01.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	2.000.000.000,00	1.895.215.730,00	99,62	104.784.270,00
1.01.03.2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1.000.000.000,00	996.190.400,00	99,62	3.809.600,00
1.01.03.2.01.01		Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1.000.000.000,00	996.190.400,00	99,62	3.809.600,00
1.01.03.2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1.000.000.000,00	899.025.330,00	89,90	100.974.670,00
		Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1.000.000.000,00	899.025.330,00	89,90	100.974.670,00
1.01.04		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA PENDIDIKAN	17.900.000.000,00	17.332.764.064,00	96,83	567.235.936,00
1.01.04.2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	17.900.000.000,00	17.332.764.064,00	96,83	567.235.936,00
1.01.04.2.01.01		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	9.100.000.000,00	8.817.479.200,00	96,90	282.520.800,00
1.01.04.2.01.02		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	8.800.000.000,00	8.515.284.864,00	96,76	284.715.136,00
2.22.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	63.331.736.154,00	61.343.411.608,00	96,86	1.988.324.546,00
2.22.02.2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah	200.000.000,00	155.564.000,00	77,78	44.436.000,00
2.22.02.2.01.01		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	200.000.000,00	155564000,00	77,78	44.436.000,00



2.22.02.2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	39.209.000.000,00	38.365.829.756,00	97,85	843.170.244,00
2.22.02.2.02.01		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	7.600.000.000,00	7.412.599.463,00	97,53	187.400.537,00
2.22.02.2.02.02		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	150.000.000,00	114.038.831,00	76,03	35.961.169,00
2.22.02.2.02.03		Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	31.459.000.000,00	30.839.191.462,00	97,03	619.808.538,00
2.22.02.2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	23.922.736.154,00	22.822.017.852,00	95,40	1.100.718.302,00
2.22.02.2.03.02		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	4.210.000.000,00	4.153.814.431,00	98,67	56.185.569,00
2.22.02.2.03.03		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	19.712.736.154,00	18.668.203.421,00	94,70	1.044.532.733,00
2.22.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	3.924.545.000,00	3.873.173.940,00	98,69	51.371.060,00
2.22.03.2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	3924545000,00	3.873.173.940,00	98,69	51.371.060,00
2.22.03.2.01.01		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	3682545000,00	3.655.988.720,00	99,28	26.556.280,00
2.22.03.2.01.02		Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	121.000.000,00	113.762.600,00	94,02	7.237.400,00
2.22.03.2.01.03		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	121.000.000,00	103.422.620,00	85,47	17.577.380,00
2.22.04		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	528.000.000,00	432.141.778,00	81,85	95.858.222,00
2.22.04.2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	528.000.000,00	432.141.778,00	81,85	95.858.222,00
2.22.04.2.01.01		Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	132.000.000,00	129.763.660,00	98,31	2.236.340,00



2.22.04.2.01.02		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	275.000.000,00	202.492.980,00	73,63	72.507.020,00
2.22.04.2.01.03		Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	121.000.000,00	99.885.138,00	82,55	21.114.862,00
2.22.05		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	510.975.000,00	460.972.621,00	90,21	50.002.379,00
2.22.05.2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	200.000.000,00	196.073.951,00	98,04	3.926.049,00
2.22.05.2.01.01		Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	200.000.000,00	196.073.951,00	98,04	3.926.049,00
2.22.05.2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	310.975.000,00	264.898.670,00	85,18	46.076.330,00
2.22.05.2.02.01		Pelindungan Cagar Budaya	132.000.000,00	110.943.070,00	84,05	21.056.930,00
2.22.05.2.02.02		Pengembangan Cagar Budaya	50.000.000,00	32.316.500,00	64,63	17.683.500,00
2.22.05.2.02.03		Pemanfaatan Cagar Budaya	128.975.000,00	121.639.100,00	94,31	7.335.900,00
2.22.06		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	670.455.000,00	641.297.008,00	95,65	29.157.992,00
2.22.06.2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	670.455.000,00	641.297.008,00	95,65	29.157.992,00
2.22.06.2.01.04		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	670.455.000,00	641.297.008,00	95,65	29.157.992,00



BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam Tahun Anggaran 2024.

Secara umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur telah melaksanakan kegiatan dengan Pagu anggaran sebesar Rp. **3.276.182.875.947,-** (Tiga Triliyun Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Seratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp. **2.851.449.555.702,87,-** (Dua Triliyun Delapan Ratus Lima Puluh Satu Milyar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua, Delapan Puluh Tujuh Rupiah) atau sebesar **87,04%**. Pada tahun anggaran 2024 semua yang masuk dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) sudah mendapat alokasi anggaran termasuk jumlah sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal, hanya saja untuk indikator ini jika diintegrasikan dengan ekstrakurikuler keagamaan dan sosial budaya maka alokasi anggaran tersedia juga melalui dana BOS pusat baik Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP). Untuk data siswa yang melanjutkan ke SMP di luar Kabupaten Kutai Timur Dinas Pendidikan masih berupaya mencari datanya melalui sekolah dengan cara merekap data alumni SD melanjutkan sekolah ke jenjang SMP/MTs mana. Untuk angka putus sekolah (APTs) jenjang SMP sebesar 0,04% atau 33 orang.

4.2 LANGKAH PERBAIKAN

Untuk lebih meningkatkan keberhasilan dalam pencapaian target Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur kedepan berupaya untuk mengatasi masalah serta kendala yang ada, dengan kiat pemecahah sebagai berikut:

1. Membangun komunikasi dengan berbagai *stakeholder* dan instansi terkait terutama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mewujudkan komitmen *spending mandatory* 20% APBD selain gaji dan tunjangan untuk sektor pendidikan.
2. Meningkatkan pelayanan terhadap berbagai produk layanan sektor pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sehingga tercapai *excellent service*.
3. Mencari berbagai peluang sumber anggaran dari APBN dan APBD provinsi untuk menunjang SPM.
4. Memaksimalkan sudut perencanaan pelaksanaan berbagai lini kegiatan dan anggaran.



5. Optimalisasi SDM terhadap tupoksi struktural dan fungsional serta pemetaan tenaga pendidik yang merata.
6. Lebih meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
7. Penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan yang menuju prasarana dan sarana yang lebih memadai untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Kutai Timur.
8. Pengajuan Peraturan Daerah sebagai landasan operasional di lapangan.

Demikian disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur, diharapkan dapat sebagai alat kendali dan penilaian kualitas kinerja dan juga sebagai media yang masih perlu penyempurnaan sehingga selaras dengan perkembangan keadaan dan kondisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur kedepan dalam rangka mewujudkan Pendidikan sebagai praktis pendidikan yang berkualitas.

Sangatta, Januari 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,



Mulyono, S.STP.,M.Si

NIP. 19770202 199703 004

